

**Dinamika Hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika Serikat
dalam Perspektif Segitiga Strategis tahun 2014-2021**

SKRIPSI



Oleh:

Gufron Gozali

18323074

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**Dinamika Hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika Serikat
dalam Perspektif Segitiga Strategis tahun 2014-2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Gufron Gozali

18323074

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Dinamika Hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika Serikat dalam Perspektif Segitiga Strategis tahun 2014-2021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

08/06/2022

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Wahyu Arif Raharjo, S.I.P., M.I.R
- 2 Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
- 3 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 1 Maret 2022



Gufron Gozali

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	15
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	15
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	16
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB II	17
Kondisi Internasional dan Hubungan Strategis Tiga Negara	17
2.1 Posisi Ketiga Aktor dalam Hubungan Internasional	17
2.2 Bagaimana Peran Pivot to Asia dalam Dinamika Hubungan Indonesia dengan AS dan Tiongkok	20
2.3 Bagaimana Peran <i>China Dream</i> dalam Dinamika Hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan AS	24
2.4 Bagaimana Peran Global Maritime Fulcrum dalam Dinamika Hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan AS	27
BAB III	31
Dinamika Hubungan Kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok dan AS di Sektor Ekonomi dan Pertahanan	31
3.1. Bentuk Pengakuan dari Tiga Negara Sebagai Aktor <i>Legitimate</i>	32
3.2 Sudut Pandang Ketiga Aktor	35

3.2.1 Sudut Pandang Tiongkok terhadap Indonesia dan AS	36
3.2.2 Sudut Pandang AS terhadap Indonesia dan Tiongkok	40
3.2.3 Sudut Pandang Indonesia terhadap Tiongkok dan AS	43
3.3 Perkembangan Hubungan Kerjasama Ekonomi dan Pertahanan antara Indonesia terhadap Tiongkok dan AS dalam Variabel Nilai (Positif dan Negatif)	46
3.3.1 Kerjasama Ekonomi Positif Indonesia - Tiongkok	47
3.3.2 Kerjasama Pertahanan Positif Indonesia -AS	52
3.4 Posisi Akhir dari Ketiga Aktor	59
BAB IV	61
Kesimpulan dan Rekomendasi	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2 Rekomendasi	62
DAFTAR PUSTAKA	64



DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar 1.1 Bentuk keterkaitan antara variabel

Gambar 1.2 Teori Segitiga Strategis

Gambar 3.1 diagram Hubungan Indonesia terhadap AS dan Tiongkok

Gambar 3.4 Bagan bentuk kerjasama pertahanan antara AS dan Indonesia dalam kurun waktu 2014-2021

Tabel 3.1 Perdagangan Indonesia dan Tiongkok dalam kurun waktu 2014-2021

Tabel 3.2 Perdagangan Indonesia dan AS dalam kurun waktu 2014-2021



DAFTAR SINGKATAN

AIIB	: Asian Infrastructure Investment Bank
AL	: Angkatan Laut
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BAKAMLA	: Badan Keamanan Laut
BI	: Bank Indonesia
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPKNP	: Badan Pekerja Komite Nasional
BRI	: Belt and Road Initiative
CICPEC	: China-Indochina Peninsula Economic Corridor
Covid 19	: Coronavirus Disease 19
EAS	: East Asia Summit
F-16	: F16 Fighting Falcon
FDR	: Front Demokrasi Rakyat
FONOPs	: Freedom Of Navigation Operations
GMF	: Global Maritime Fulcrum
HAM	: Hak Asasi Manusia
KRI	: Kapal Perang Indonesia
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi

LCS	: Laut China Selatan
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
OBOR	: One Belt and Road
PLA	: People's Liberation Army
PRC	: People's Republic of China
QUAD	: Quadrilateral Security Dialogue
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
RRC	: Republik Rakyat China
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SULNI	: Statistik Utang Luar Negeri Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPP	: Trans Pacific Partnership
UNCLOS	: United Nations Convention on the Law of the Sea
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif



ABSTRAK

Persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) dalam kurun waktu 2014-2021 telah merubah peta politik di Asia. Kedua negara yang memiliki ambisi yang saling berseberangan membuat negara lain yang lebih kecil harus bersikap dengan tepat. Dalam hal ini Indonesia memainkan posisi penting dalam persaingan antara Tiongkok dan AS. Indonesia berusaha membangun hubungan yang positif diantara keduanya melalui kerjasama ekonomi dan pertahanan. Indonesia bergabung dalam proyek ekonomi *Belt Road Initiative* (BRI) yang diinisiasi oleh Tiongkok, serta mendukung inisiasi *Free and Open Indo-Pacific* yang dicetuskan oleh AS. Dinamika yang terjadi diantara ketiga negara sejak tahun 2014-2021 berperan besar sebagai acuan untuk melihat geopolitik kedepannya.

Kata Kunci: Indonesia, Tiongkok, AS, ekonomi, pertahanan, BRI, Free and Open Indo-Pacific

Abstract

Competition between China and the United States (US) in the period 2014-2021 has changed the political map in Asia. The two countries have conflicting ambitions, so the smaller country must act appropriately. In this regard, Indonesia plays an important position in the competition between China and the US. Indonesia seeks to build positive relations between the two through economic and defense cooperation. economic project *Belt Road Initiative* initiated by China, and supports the *Free and Open Indo-Pacific* initiated by the US. The dynamics that occurred between the three countries from 2014-2021 played a major role as a reference for looking at geopolitics in the future.

Keywords: Indonesia, China, US, economy, defense, BRI, Free and Open Indo-Pacific

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2014, kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi mendapat banyak sorotan dari akademisi hingga masyarakat umum, terutama dalam menghadapi dua kekuatan global Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok atau RRC (Republik Rakyat Tiongkok). Kedekatan Indonesia dengan Tiongkok melalui kerjasama ekonomi dan investasi telah merubah peta geopolitik di Asia Tenggara dan Asia Pasifik (Ben Bland 2020). Tiongkok menjadi mitra utama perdagangan Indonesia di tahun 2021 serta menempati posisi kedua sebagai investor terbesar setelah Singapura. Bahkan disaat pandemi Covid-19, ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Widianto 2021).

Kedekatan kedua negara tidak lepas dari kebutuhan satu sama lain. Melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu titik tumpu bagi keberhasilan proyek ini (Pratiwi et al. 2020). Sedangkan bagi Indonesia, Tiongkok dapat menjadi mitra dalam mewujudkan visi “Global Maritime Fulcrum”. Visi ini menekankan pada perbaikan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas serta keamanan, akan tetapi visi ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Maka dari itu Jokowi memilih Tiongkok sebagai mitra utama Indonesia (Tiola 2019).

Di sisi lain Amerika Serikat (AS) yang merupakan mitra lama bagi Indonesia di sektor ekonomi dan keamanan, dianggap telah tergantikan oleh Tiongkok. Dari laporan *Atlantic Council* pada masa Perang Dingin khususnya di tahun 1980-an, Indonesia merupakan bagian dari wilayah hegemoni AS melalui kerjasama keamanan dan ekonomi. Namun, berselang 40 tahun atau di tahun 2020 Tiongkok berhasil menggeser dominasi AS di Indonesia (Moyer et al. 2021).

Kedekatan ini berasal dari kerjasama melalui *Strategy Partnership* tahun 2005, *Belt Road Initiative (BRI)* tahun 2013 dan *Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB)* tahun 2014. Kedekatan antara Indonesia dengan Tiongkok tidak hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi, akan tetapi salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan Presiden Trump yang cenderung pasif di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Trump tidak pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama empat tahun masa kepresidenannya. Di sisi lain Xi Jinping secara resmi telah melakukan sembilan kali pertemuan bilateral di Jakarta maupun Tiongkok pada tahun pertama masa Kepresidenan Jokowi (Hart 2015). Trump kemudian menuduh Indonesia melakukan tindakan curang di sektor perdagangan yang menyebabkan defisit perdagangan bagi AS. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh AS di Indonesia sudah menurun.

Di sisi lain, Indonesia dan Tiongkok menghadapi ketegangan dalam kasus klaim wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Ini menjadi sebuah tantangan bagi hubungan kedua negara di masa depan. Indonesia tidak memiliki hak kedaulatan di Laut China Selatan, akan tetapi Indonesia memiliki hak berdaulat. Stabilitas Laut China Selatan merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia. Sikap Tiongkok yang sangat agresif dengan memberikan pengawalan terhadap kapal

penangkap ikannya saat memasuki wilayah Indonesia, melakukan patroli menggunakan kapal perang, sampai membangun pulau buatan sebagai pangkalan militer merupakan sebuah ancaman nyata bagi Indonesia dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik (Strangio 2020).

Isu ini membuat hubungan pertahanan kedua negara menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah Jokowi. Sejak tahun 2015 hingga 2021, pemerintah telah menganggarkan lebih dari 100 triliun setiap tahunnya untuk pembelian alutsista, pemeliharaan alutsista, non alutsista, sarana dan prasarana dan manajemen (Jasmine 2021). Dalam hal ini, Indonesia dan AS memiliki masalah yang serupa yakni menghadapi agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan. Kedekatan Indonesia dengan Tiongkok secara ekonomi tidak membuat Jokowi melupakan sisi pertahanan. Ditunjuknya Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan merupakan sebuah dilematis karena Prabowo memiliki rekam jejak terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang membuatnya mendapatkan larangan untuk masuk ke AS selama 20 tahun. Namun, di akhir tahun 2020, AS secara resmi mencabut larangan tersebut dan mengundang Prabowo untuk datang ke AS. Salah satu topik yang dibahas yakni membicarakan isu Laut China Selatan (Septiarie dan Santosa 2020).

Beralih ke Tiongkok, Peluang Tiongkok untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengunduran diri Trump dari "posisi kepemimpinan global" AS sangat tipis, dan bahkan lebih tipis daripada yang diproyeksikan oleh banyak pengamat domestik dan internasional. Daya tarik "kekuatan lunak" Tiongkok di dunia, serta sumber daya dan pengalaman yang dimilikinya, terbatas dan kesulitan domestik dan internasional yang akan dihadapi Tiongkok, terutama kompleksitas

yang dihasilkan oleh pandemi virus corona, adalah signifikan. Selain menghormati urusan dalam negeri Tiongkok, Xi menjelaskan bahwa AS harus mengakui Tiongkok sebagai aktor yang setara di panggung internasional sebagai wujud perlakuan hormat AS. Dalam praktiknya, ini berarti memasukkan Tiongkok dalam inisiatif global yang dipimpin AS, serta inisiatif teman dan mitranya. Xi memberi tahu Biden bahwa Tiongkok telah menunjukkan rasa hormat kepada AS dengan menjaga pintu tetap terbuka untuk 'inisiatif global yang disarankan Tiongkok.

Kemudian di Tiongkok, tampaknya ada konsensus yang berkembang bahwa hubungan AS-China akan tetap buruk di masa mendatang. Meskipun demikian, Presiden Xi Jinping dan yang lainnya berpendapat bahwa waktu dan momentum ada di pihak Tiongkok, saat ini Tiongkok bergerak lebih dekat ke pusat panggung global. Pembuat kebijakan Tiongkok tahu bahwa untuk mencapai tujuan nasional negara mereka, mereka harus mengatasi rintangan. Untuk mencapai hal ini, Tiongkok tampaknya mengejar strategi jangka menengah tiga cabang. Pertama, mempertahankan lingkungan eksternal yang tidak bermusuhan untuk fokus pada prioritas domestik. Kedua, mengurangi ketergantungan pada Amerika sambil meningkatkan ketergantungan pada Tiongkok oleh seluruh dunia. Ketiga, memperluas jangkauan pengaruh Tiongkok ke luar negeri.

Pengembangan strategis dalam hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok telah secara signifikan menjadi geopolitik strategis yang direncanakan dengan rute perdagangan yang membentang antara Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Tiongkok dan Amerika Serikat meningkatkan upaya mereka untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara. Saat persaingan semakin memanas, Indonesia muncul sebagai target utama diplomasi AS maupun Tiongkok. Kemudian dampak dari

penyeimbangan kembali militer AS terhadap China merupakan isu strategis yang lebih penting bagi Indonesia. Bukan kepentingan Indonesia jika hal itu mengakibatkan eskalasi strategis antara AS dan China, serta destabilisasi regional. Meskipun terdapat tumpang tindih antara klaim Indonesia atas ZEE di dekat Kepulauan Natuna dan klaim maritim China, Indonesia bukan merupakan pengklaim wilayah di Laut China Selatan. Akibatnya, China mengawasi interaksi anggota ASEAN lainnya.

Pada saat ini, Amerika Serikat akan tetap memandang Indonesia sebagai wilayah yang penting dalam persaingan antara AS-Tiongkok. Ini didasarkan pada letak geografis Indonesia yang berada di tengah-tengah Indo-Pasifik. Tiongkok tidak akan mampu menggantikan hubungan keamanan Amerika Serikat dan Indonesia, walaupun Tiongkok mendominasi di sektor ekonomi. Hubungan keamanan yang telah dijalin dalam kurun waktu yang cukup lama menempatkan Amerika Serikat dan sekutunya menjadi distributor terbanyak bagi persenjataan serta mitra pendidikan dan militer Indonesia (Laksmana 2021). Sehingga, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dinamika hubungan kerjasama Indonesia terhadap Tiongkok dan AS dalam perspektif segitiga strategis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini berupa: “*Bagaimana dinamika hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika Serikat dalam teori Segitiga Strategis tahun 2014-2021?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana dinamika hubungan Indonesia terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat dalam perspektif segitiga Strategis tahun 2014-2021.
2. Mengetahui bagaimana ketiga aktor melihat satu sama lain, kemudian bentuk pengakuan sebagai aktor yang sah serta strategi yang digunakan.
3. Mengetahui bagaimana hubungan negatif dan positif diantara ketiga aktor terjalin dalam kurun waktu 2014-2021.

1.4 Cakupan penelitian

Perebutan hegemoni yang terjadi antara Tiongkok dan AS berpengaruh besar atas stabilitas di kawasan Asia. Khusus bagi Indonesia situasi ini melahirkan tantangan dan peluang, kedua negara yang memiliki hubungan buruk mendorong Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya (Byrne 2020). Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk membangun hubungan positif antara kedua negara

melalui kerjasama ekonomi dan pertahanan. Bagaimana hubungan kedua aktor direpon satu sama lain khususnya bagi Indonesia dalam kurun waktu 2014-2021. Tahun 2014 dipilih atas alasan menjadi awal dari dibentuknya doktrin “Global Maritime Fulcrum” yang digunakan oleh Indonesia untuk merespon AS dan Tiongkok. Sedangkan pemilihan tahun 2021 didasarkan atas dinamika yang terjadi diantara ketiga negara, Tiongkok dan AS semakin agresif dan Indonesia menegaskan diri tidak memihak salah satu pihak dan menjalin hubungan yang semakin positif dengan Tiongkok dan AS. Kemudian penelitian ini akan berfokus pada bentuk pengakuan, kerjasama dan ancaman yang dilayangkan oleh tiap aktor. Maka dari itu penelitian ini akan membahas hubungan dinamika yang dibangun antara Indonesia dengan AS-Tiongkok tahun 2014-2021.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sejauh ini penelitian terkait dengan hubungan segitiga antara Indonesia, Tiongkok dan AS telah diteliti oleh banyak peneliti dunia seperti René L Pattiradjawane dalam jurnalnya yang berjudul “*The Indonesian perspective toward rising China: Balancing the national interest*”. Pattiradjawane (2016) menjelaskan bahwa kebangkitan China memaksa Indonesia harus mampu beradaptasi dengan situasi yang ada. Kedekatan kedua negara semakin terlihat setelah ditandatanganinya “Strategic Partnership” di tahun 2013 oleh Presiden SBY. Pattiradjawane kemudian menjelaskan persepsi publik atas kedekatan Indonesia dengan Tiongkok serta peluang Tiongkok menggantikan dominasi Amerika Serikat di Indonesia dan dunia. Argumen Pattiradjawane sudah sangat baik menjelaskan dinamika hubungan Indonesia dan Tiongkok. Namun, Pattiradjawane belum

menjelaskan secara rinci bagaimana hubungan ketiga negara saling mempengaruhi. Sehingga, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dinamika hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan AS dalam perspektif segitiga strategis.

Penelitian terkait dengan hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika Serikat telah diteliti oleh Yohanes Sulaiman, Mariane Delanova dan Rama Daru Jati dalam jurnalnya yang berjudul "*Indonesia between the United States and China in a Post-Covid-19 World Order*". Sulaiman, Delanova, and Jati (2021) menjelaskan bahwa hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin meruncing pada saat pandemi. Pandemi memperkuat sikap ketidakpercayaan satu sama lain yang melibatkan Tiongkok dan Amerika Serikat. Ini disebabkan salah satunya oleh sikap agresif Tiongkok di Laut China Selatan. Bukan hanya berdampak kepada kedua negara, Indonesia yang memiliki hubungan yang dekat dengan kedua negara mengalami hal yang sama, mulai dari krisis kesehatan, ekonomi sampai keamanan. Sulaiman bersama Delanova dan Jati selanjutnya menjelaskan bahwa cara terbaik untuk mengimbangi Tiongkok dan Amerika Serikat yakni dengan memperkuat hubungan dengan negara tetangga yang ada di ASEAN. Namun, Sulaiman dan teman-teman belum menjelaskan secara rinci bagaimana dinamika hubungan kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dan AS dalam perspektif segitiga strategis.

Dalam beberapa tahun terakhir penelitian terkait dengan hubungan strategis yang dibangun antara Indonesia, Tiongkok dan Amerika Serikat telah diteliti oleh banyak pengkaji hubungan internasional. Salah satunya dilakukan oleh Aisyah Dwi Qudsiati dan Badrus Sholeh dalam jurnal artikel yang berjudul "*The Role Analysis of Indonesia's Policy Strategy on Indo-Pacific*." Qudsiati dan Sholeh (2020)

menjelaskan bahwa “Indo-Pacific” merupakan wilayah yang sangat penting bagi banyak negara, Amerika Serikat selama ini memainkan peranan penting dalam membentuk stabilitas, namun kebangkitan Tiongkok yang diiringi dengan sikap agresif membuat wilayah ini memasuki era baru. Maka dari itu, Indonesia harus mampu memainkan peran sebagai “*middle force*” dengan menekankan pada kebijakan “Global Maritime Fulcrum.” Qudsiati dan Sholeh sudah sangat baik menjelaskan perang Indonesia di “Indo-Pasifik” melalui teori “Balance of Power.” Namun, Qudsiati dan Sholeh belum menjelaskan secara terperinci bagaimana hubungan Indonesia terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat di sektor ekonomi dan keamanan serta efektifitas dari kebijakan “Global Maritime Fulcrum.” Maka dari itu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dinamika hubungan kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dan AS dalam perspektif segitiga strategis.

Riset mengenai kebijakan luar negeri yang dibangun antara Indonesia, Tiongkok dan AS telah dipublikasi oleh banyak peneliti, salah satunya Sebastien Colin dalam jurnal artikel yang berjudul “*China, the US, and the Law of the Sea.*” Colin (2016) menjelaskan bahwa kebangkitan Tiongkok mendorongnya untuk melakukan perluasan pengaruh khususnya di Laut China Selatan. Amerika Serikat menganggap ini sebagai sebuah ancaman nyata bagi stabilitas di Asia Pasifik, maka dari itu AS merespon tindakan ini melalui “United Nations Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS). Argumen yang disampaikan Colin sudah sangat bagus menjelaskan bagaimana dinamika yang melibatkan Tiongkok dan AS di Laut China Selatan. Namun, Colin belum menjelaskan bagaimana dinamika hubungan Indonesia terhadap Tiongkok dan AS dalam perspektif segitiga strategis.

Kemudian dinamika hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dapat dibaca melalui *book section* atau bagian buku yang berjudul “*Six Decades of Indonesia-China Relations*” yang di editor oleh Christin Sinaga tahun 2019. Christin bersama dengan para peneliti lain menjelaskan dengan sangat komprehensif bagaimana dinamika hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dalam kurun waktu enam puluh tahun terakhir. Hubungan kedua negara berjalan begitu dinamis, pemutusan hubungan bilateral sampai penandatanganan kerjasama ekonomi secara masif menjadi pengingat bagi hubungan kedua negara. Christin dengan para peneliti lain sudah sangat bagus dalam mengulas hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Namun, Christin belum menjelaskan bagaimana dinamika hubungan Indonesia terhadap Tiongkok dan AS dalam perspektif segitiga strategis.

Dari seluruh pustaka yang tersaji di atas, pemahaman mengenai dinamika hubungan ketiga negara ini belum dibahas secara spesifik melalui kacamata segitiga strategis. Maka dari itu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Indonesia mengimbangi Tiongkok dan Amerika Serikat pada tahun 2014 - 2021 melalui teori segitiga strategis. Maka dari itu penelitian ini akan membahas bagaimana dinamika hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan AS dalam perspektif segitiga strategis.

1.6 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional tidak lepas dari kerjasama yang dilakukan oleh dua negara maupun lebih. Kerjasama yang dijalankan tentunya berdasarkan pada kondisi ataupun dinamika yang sedang terjadi di dunia internasional. Lowell Dittmer yang merupakan ahli di kajian tentang Tiongkok di tahun 1981

mencetuskan teori Segitiga Strategis dalam melihat dinamika hubungan yang dibangun oleh AS terhadap Tiongkok dan Uni Soviet. Dittmer menjelaskan bahwa teori segitiga strategis seperti sebuah permainan melibatkan tiga pihak. Dalam permainan ini ketiga pihak memiliki peluang yang sama untuk membentuk hubungan melalui tiga variabel. Tiga variabel dalam permainan ini yakni nilai (hubungan positif negatif), simetrikal atau kekuatan (kuat/lemah) dan terakhir gabungan dari nilai dan kekuatan.

Gambar 1.1 Bentuk keterkaitan antara variabel

THE STRATEGIC TRIANGLE

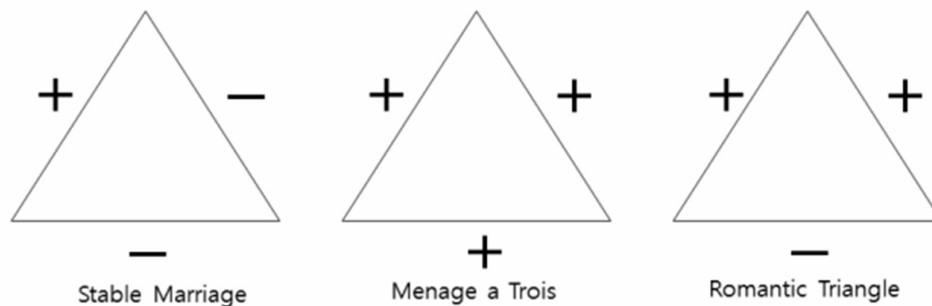
		Balance	
		symmetrical	asymmetrical
Value	positive	1	3
	negative	2	4

FIGURE I

Selanjutnya Dittmer menekankan bahwa dalam melihat permainan ini, aturan pertama yang harus diikuti adalah bagaimana ketiga aktor saling mengakui keberadaan atau arti penting strategi satu sama lain. Dan kedua, dalam setiap pemain tidak perlu memiliki strategi yang sama namun mereka hanya perlu saling mengakui legitimasi masing-masing agar hubungan antar dua pemain dipengaruhi oleh hubungan ke pemain ketiga. Dittmer menyampaikan bahwa hubungan antara negara terjalin dalam bentuk segitiga yang saling mempengaruhi. Secara lebih jelas, negara A mempengaruhi hubungan yang telah dijalin antara negara B dan C atau sebaliknya, hubungan yang dijalin antara negara B dan C mempengaruhi negara A (Dittmer 1981).

Perlu dipahami bahwa asumsi dasar teori ini yakni, adanya *Exchange of benefit* dan *Exchange of Sanctions* yakni setiap aktor dihadapkan pada pilihan untuk menjalin kerjasama maupun konfrontasi. Maka dari itu, variabel nilai yang terdiri dari nilai positif dan negatif didasarkan pada perilaku atau tindakan kedua pemain dalam hubungan yang dijalin atau hubungan bilateral satu sama lain. Dalam hal ini setiap pemain memiliki peluang untuk membentuk hubungan positif melalui kerjasama maupun perdagangan, sedangkan negatif melalui perang atau konfrontasi. Namun, perlu dilihat bahwa tidak semua hubungan positif antara kedua negara dapat dimaknai secara otomatis di semua aspek begitupun sebaliknya dengan hubungan negatif (Dittmer 1981).

Gambar 1.2 Pola Teori Segitiga Strategis



Aturan main yang didasarkan pada nilai, kekuatan dan gabungan dari nilai dan kekuatan menghasilkan tiga jenis kategori. Pertama, “perkawinan yang stabil” kondisi ini disebabkan oleh dua aktor yang menjalin hubungan persahabatan, sedangkan aktor ketiga memiliki pandangan yang berseberangan atau bermusuhan dengan dua aktor tadi. Dittmer dengan begitu baik menjelaskan kategori ini melalui hubungan yang dibangun oleh Amerika Serikat, Uni Soviet dan pada saat Perang Dingin. Hubungan ini terjalin sejak kemerdekaan Tiongkok pada 1949 sampai

1960-an. Kedekatan antara Uni Soviet dan Tiongkok pada masa Perang Dingin didasarkan pada nilai yang sama yakni komunisme. Sehingga secara alami musuh dari Uni Soviet dan Tiongkok adalah Amerika Serikat karena adanya perbedaan nilai. Kedua, “*menage a trois*” merupakan kondisi yang didasarkan pada hubungan antar tiap aktor berjalan secara simetrikal. Hubungan ini menghasilkan ketidakpastian antar tiap aktor karena *power* yang dimiliki dapat berubah setiap saat. Ini dibuktikan pada kekuatan militer yang dimiliki oleh Tiongkok dan AS, Tiongkok pada tahun 1960 an masih tergolong sebagai negara dengan kekuatan militer yang kecil. Namun, pertumbuhan ekonomi yang begitu masif berhasil mentransformasi kekuatan militer Tiongkok.

Terakhir, “segitiga romantis” merupakan kondisi yang disebabkan oleh adanya dua pihak yang bermusuhan, dan pihak lainnya memanfaatkan ini dengan menjalin hubungan persahabatan kepada dua pihak tadi. Kondisi ideal ini bisa diwujudkan jika pihak A merupakan negara adidaya, dan dua pihak lainnya memiliki kekuatan lebih kecil. Namun, ada pengecualian seperti dalam kasus hubungan Taiwan dengan AS dan Tiongkok, Taiwan sebagai pihak yang memiliki *power* lebih kecil berhasil memanfaatkan hubungan positif dengan kedua belah pihak. Beralih ke penjelasan teori, pihak A disebut sebagai poros penyeimbang karena mampu mengoptimalkan keuntungannya dan mencegah kerugian yang besar.

Dittmer memberikan implementasi dari kategori ini melalui hubungan yang dibangun antara Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan Uni Soviet pada tahun 1970 - 1978. Dalam masa ini, AS memainkan peran penting karena disaat Tiongkok dan Uni Soviet sedang berseteru, AS menjalin hubungan dengan kedua negara dan

menciptakan konflik agar posisinya sebagai ‘poros’ tetap terjaga. Dalam penelitian ini pola segitiga romantis diaplikasikan Indonesia melalui hubungan positif dengan Tiongkok dan AS. Indonesia berhasil menjadi pemain poros dengan memanfaatkan hubungan negatif antara Tiongkok dan AS. Indonesia sadar bahwa ini merupakan sebuah kesempatan melalui kerjasama positif di sektor ekonomi dengan Tiongkok dan kerjasama positif dengan AS di sektor pertahanan.

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan variabel nilai dan simetrikal dalam pola Segitiga Romantis. Dalam hal ini, keterbatasan jangka waktu penelitian yakni 2014-2021 mengharuskan penulis menggunakan satu pola. Jika dibandingkan dengan teori segitiga strategis, Dittmer memiliki jangka waktu yang sangat panjang yakni pada saat Perang Dingin oleh karena itu Dittmer mampu menjelaskan hubungan ketiga negara berdasarkan tiga pola segitiga. Selanjutnya ini didasarkan pada bagaimana dinamika hubungan bilateral dan kerjasama Indonesia terhadap Tiongkok dan AS begitupun sebaliknya. Indonesia dalam hal ini membangun hubungan dan kerjasama yang positif dengan Tiongkok dan AS. Dinamika ini melahirkan pola segitiga romantis diantara ketiga negara dalam periode 2014-2021.

1.7 Argumen Sementara

Keagresifan Tiongkok di Laut China Selatan dan komitmen Amerika Serikat untuk menegakan prinsip “Freedom of Navigation” membuat Indonesia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok, hal ini dibuktikan dengan neraca perdagangan kedua negara yang meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, Indonesia

memiliki masalah dengan Tiongkok di Laut China Selatan. Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk membangun hubungan yang lebih strategis dengan aktor lain yakni Amerika Serikat untuk dapat menjaga kedaulatannya. Sehingga, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dinamika hubungan kerjasama Indonesia terhadap Tiongkok dan AS dalam perspektif segitiga strategis.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif. Metode ini cukup sering digunakan oleh para ilmuwan sosial. Metode kualitatif menekankan hasil penelitian yang tidak ditentukan dalam pengukuran angka (M.A 2021). Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif sebagai dasar dalam menjelaskan bagaimana dinamika hubungan kerjasama Indonesia terhadap Tiongkok dan AS dalam perspektif segitiga strategis tahun 2014-2021.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah dinamika hubungan kerjasama Indonesia, sedangkan objek yang diteliti yakni Tiongkok dan Amerika Serikat dari perspektif segitiga strategis.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data sekunder. Sehingga, sumber data yang digunakan berasal dari buku, jurnal, artikel, serta berita yang dapat dipertanggungjawabkan atau valid.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur, selanjutnya penulis membaca agar dapat memahami substansi serta memilih data mana yang bisa digunakan dan tidak bisa digunakan dalam penelitian. Tahapan selanjutnya penulis akan memilih atau menentukan sub-bab berdasarkan data yang telah diperoleh. Dan terakhir sampai pada tahap melakukan pemaparan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama penulis akan menceritakan serta menjelaskan alasan pemilihan judul “Dinamika Hubungan Kerjasama Indonesia terhadap Tiongkok dan AS dalam Perspektif Segitiga Strategis. Di bab kedua penulis akan memaparkan bagaimana proyek BRI Tiongkok berkaitan dengan visi GMF Indonesia dan disaat bersamaan menjadi ancaman bagi AS. Memasuki bab ketiga penulis akan menjelaskan secara rinci hubungan kerjasama maupun hubungan yang menguat dan melemah dari ketiga negara. Dan di bab 4 penulis akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan terkait hubungan Indonesia terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok.

BAB II

Kondisi Internasional dan Hubungan Strategis Tiga Negara

Pada Bab 1 Penulis menyampaikan bagaimana latar belakang penelitian yang melibatkan tiga negara ini. Maka dari itu, Bab 2 akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana eksistensi ketiga aktor dalam politik internasional dan bagaimana ketiga negara melihat satu sama lain melalui proyek atau doktrin satu sama lain. Ketiga doktrin atau pandangan ini berkaitan satu sama lain dibuktikan dengan respon dari ketiga aktor. Pandangan ini menjadi syarat mutlak dalam segitiga strategis dan ini menjadi pengantar di bab 3 bagaimana hubungan kerjasama yang akan dibangun nantinya.

2.1 Posisi Ketiga Aktor dalam Hubungan Internasional

Dari laporan Lowy Institute perebutan pengaruh di Asia menunjukkan hasil yang cukup penting. Dalam tiga tahun terakhir perebutan pengaruh yang melibatkan Tiongkok dan AS berjalan begitu dinamis, AS tetap menjadi negara dengan pengaruh yang paling besar di Asia namun, Tiongkok terus memperluas dan memperkuat pengaruhnya. Di tahun 2019 pengaruh AS 84,5 Tiongkok 75,9 selanjutnya di tahun 2020 pengaruh AS 81,6 Tiongkok 76,1 dan terakhir di tahun 2021 pengaruh AS 82,6 Tiongkok 74,6. Laporan ini berdasarkan dari 131 indikator yang meliputi pengaruh ekonomi, pengaruh diplomatik sampai pengaruh keamanan (Lowy Institute 2021).

Tiongkok berhasil menjadi “*rising power*” sejak bergabung dengan WTO tahun 2001. Keberhasilan ini mendorong Tiongkok untuk dapat memperluas pengaruhnya melalui kerjasama ekonomi yang sangat komprehensif. Dari laporan *Atlantic Council* pada masa Perang Dingin khususnya Asia merupakan bagian dari wilayah hegemoni AS melalui kerjasama keamanan dan ekonomi. Namun, berselang 40 tahun atau di tahun 2020 Tiongkok berhasil menggeser dominasi AS di Asia. Kedekatan ini berasal dari kerjasama *Belt Road Initiative* (BRI) tahun 2013 dan *Asia Infrastructure Investment Bank* (AIIB) tahun 2014.

Perlu diketahui bahwa Xi Jinping melalui “Grand Strategy China Dream” di tahun 2013 mencoba menerapkan dan menyebarkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok dan penyatuan kembali seluruh Tiongkok (Scobell et al. 2020). Sikap merangkul Tiongkok melalui kerjasama ekonomi di satu sisi sangat bertolak belakang dengan manuver Tiongkok yang sangat masif di Laut China Selatan melalui pembangunan pangkalan militer, melakukan patroli serta latihan militer sejak tahun 2015. Ini merupakan sebuah ancaman nyata bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik yang merupakan rumah bagi banyak sekutu Amerika Serikat seperti Jepang, Australia, dan negara-negara di Asia Tenggara.

AS kemudian melihat bahwa investasi yang diberikan oleh Tiongkok melalui BRI dianggap sebagai jebakan hutang yang sangat membahayakan. Diplomasi jebakan hutang merupakan konsep yakni, dimana negara kreditur memberikan pinjaman dengan jumlah yang sangat besar ke negara debitur yang digunakan sebagai modal untuk pembangunan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Namun, pinjaman ini didesain agar negara debitur tidak mampu membayar

hutang dan pada akhirnya aset dari negara debitur akan diambil melalui skema konsesi. Diplomasi jebakan utang Tiongkok dibuktikan pada proyek Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka pada tahun 2017.

Bukan hanya itu, AS secara tegas berusaha mencegah negara-negara lain khususnya para mitranya untuk tidak membeli senjata dari Tiongkok, salah satunya Indonesia. Pada saat Indonesia ingin membeli senjata dari Rusia dan Tiongkok di tahun 2020, Trump memberikan ancaman berupa penerapan “Countering America's Adversaries Through Sanctions Act” (CAATSA) yakni sanksi ekonomi dan pertahanan bagi negara yang melakukan pembelian senjata dengan Iran, Rusia dan Korea Utara. Perlu diketahui bahwa pada saat itu Indonesia sedang melakukan komunikasi dengan Rusia untuk merundingkan pembelian pesawat Sukhoi dan kapal selam dari Tiongkok. Namun, AS menganggap ini sebagai sebuah ancaman. Akhirnya Indonesia memutuskan untuk tidak membeli senjata tersebut.

Kita harus memahami bahwa posisi AS dalam politik internasional sangat penting. AS yang selama ini merasa bahwa dirinya sebagai negara hegemoni satu-satunya karena didasarkan pada kekuatan ekonomi dan militer tidak ingin posisinya digantikan oleh Tiongkok. Maka dari itu AS berusaha semaksimal mungkin mempertahankan posisi ini dengan cara mencegah agresivitas Tiongkok di LCS serta mencegah negara lain semakin mendekat ke Tiongkok melalui sanksi maupun kerjasama.

Dua negara hegemon yang semakin aktif di wilayah Asia nampaknya merespon Jokowi melalui kebijakan “Poros Maritim Global” untuk mengamankan wilayah laut baik dari segi keamanan maupun ekonomi. Kebijakan ini kemudian

didukung dengan dibentuknya Badan Keamanan Laut tahun 2014 serta Kementerian Bidang Maritim dan Sumberdaya RI tahun 2015. Sebastian Strangio yang merupakan jurnalis dan penulis dengan fokus kajian Asia Tenggara dalam buku “In the Dragon's Shadow: Southeast Asia in the Chinese Century” menyatakan bahwa Indonesia memainkan posisi yang penting bagi perebutan pengaruh antara Tiongkok dan AS di kawasan Asia-Pasifik.

Indonesia mendorong stabilitas kawasan melalui “Indo-Pacific Outlook” di tahun 2019. Indonesia sebagai pemimpin ASEAN ingin menguatkan peran ASEAN di regional melalui kerangka “Indo-Pacific Outlook” sebagai respon dari sikap AS. Penguatan kerjasama pertahanan yang dibentuk AS bersama Jepang, India dan Australia dalam bentuk “Quad” untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di “Laut China Selatan” merupakan ancaman bagi stabilitas di regional. AS disatu sisi mencoba mencegah agresivitas Tiongkok agar terwujudnya Indo-Pasifik yang “bebas” namun, Indonesia melihat ini pada akhirnya akan mengarahkan pada terbentuknya poros antara AS dan Tiongkok.

2.2 Bagaimana Peran Pivot to Asia dalam Dinamika Hubungan Indonesia dengan AS dan Tiongkok

Pengaruh Tiongkok yang semakin membesar di sektor ekonomi dan keamanan direspon oleh Amerika Serikat melalui kebijakan “Pivot to Asia” di tahun 2011. Secara khusus kebijakan ini menekankan pada peningkatan kerjasama ekonomi, investasi dan diplomasi yang lebih strategis. Ini diimplementasikan pada pembentukan “Trans-Pacific Partnership” serta penambahan 2500 tentara Amerika

Serikat di Australia (Clinton 2011). Namun pada penerapannya, Obama gagal membawa “Pivot to Asia” untuk dapat mengimbangi Tiongkok. Kebijakan “Pivot to Asia” yang menekankan pada peningkatan peran AS di Asia nyatanya hanya sampai pada pembentukan forum kerjasama seperti “Trans Pacific Partnership” (TPP). Obama gagal mencegah agresivitas Tiongkok di LCS dan menguatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia (Gingrich 2020).

Obama pernah menyebut dirinya sebagai presiden Pasifik pertama dan Pivot to Asia itu disebut-sebut oleh para pembela Obama sebagai sukses besar karena Kebijakan itu telah menyeimbangkan kembali fokus kebijakan luar negeri Amerika dari intervensi mahal di Timur Tengah ke Asia dengan tepat. Namun realitanya, kebijakan Pivot to Asia adalah kegagalan yang menyebabkan efek samping negatif yang serius di bagian lain dunia. Kesalahan pertama yaitu ada asumsi yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri AS sebelumnya telah mengabaikan Asia Pasifik dan bahwa peningkatan kepentingan di Asia dalam ekonomi global menuntut perubahan fokus lebih banyak sumber daya militer ke kawasan itu. Kedua adalah asumsi bahwa Amerika Serikat mampu menarik diri dari Timur Tengah dan wilayah lain. Padahal dengan mengambil pendekatan semacam itu, pemerintahan Obama justru memperburuk ketegangan di Asia-Pasifik dan membiarkan Timur Tengah dan Eropa jatuh ke dalam kekacauan yang lebih buruk dari sebelumnya.

Dengan menempatkan Asia sebagai pusat strategi keamanannya, pemerintahan Obama secara tidak sengaja melahirkan situasi yang diterjemahkan Tiongkok sebagai upaya untuk menahan secara militer. Hal ini menyebabkan Tiongkok merespon kebijakan “Pivot to Asia” tersebut dengan menjadi lebih agresif. Tiongkok percaya bahwa strategi AS di kawasan itu berpusat pada upaya

menahan kebangkitan Tiongkok, dan Amerika Serikat secara terbuka mengatakan ini persis seperti yang dilakukannya (Gingrich 2019).

Kesalahan terakhir, yaitu kebijakan Pivot to Asia itu menolak kebangkitan Tiongkok. Dalam hal ini AS cenderung bersikap meremehkan Tiongkok dalam bentuk kebijakan yang terkesan tidak seketat pada saat ini. Sebaliknya, Tiongkok menjadi lebih agresif dengan semakin memperkuat klaimnya di Laut Cina Selatan dan Senkaku. Tiongkok juga terus mempersempit kesenjangan kemampuan militer dengan AS melalui peningkatan anggaran pertahanan. Ekonominya terus tumbuh, seperti halnya dengan proporsi ekonomi Tiongkok terhadap PDB Global. TPP tampaknya akan mati di Kongres, sementara Tiongkok mengejar kesepakatan perdagangannya sendiri dengan negara-negara utama di kawasan itu. Pivot to Asia gagal mencapai tujuan utamanya di Asia. Mengingat pentingnya Asia-Pasifik, kegagalan ini kemungkinan akan diingat sebagai kesalahan terbesar Presiden Obama dalam kebijakan luar negeri.

Disisi lain, perlu diketahui bahwa defisit perdagangan yang mencapai 295,5 miliar dollar di tahun 2011 disebut sebagai defisit perdagangan tertinggi yang pernah ada dalam sejarah AS (Council on Foreign Relations 2022). Ini menjadi salah satu alasan Presiden Donald Trump di tahun 2018 untuk melakukan Perang Dagang dengan Tiongkok. Doktrin “American First” yang digaungkan oleh Trump secara singkat mencoba mengatakan pada dunia bahwa AS akan bersikap lebih tegas kepada mitra perdagangannya yang dianggap melakukan kecurangan. Trump mencoba menerapkan sikap “proteksionisme” yang salah satunya diterapkan terhadap Tiongkok (Kaplan 2021).

Bukan hanya itu, Trump juga kembali menegaskan tentang “Freedom of Navigations. Trump ingin stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dapat terwujud melalui prinsip “Freedom Of Navigation Operations” (FONOPs) di tahun 2016. Freedom of Navigation merupakan sebuah prinsip yang lahir atau didasarkan dari adanya hukum laut UNCLOS. Freedom of Navigations secara singkat memberikan akses bagi tiap negara untuk mengirimkan kapalnya melintasi perairan internasional tanpa harus mendapatkan gangguan. Amerika Serikat tidak bergerak sendiri di Laut China Selatan, Trump mengajak sekutu dekat Amerika Serikat yakni Australia, Jepang serta Eropa Barat (NATO) untuk dapat bekerjasama mengimbangi pengaruh Tiongkok .

Pada akhirnya penyeimbangan kembali AS terhadap Tiongkok merupakan isu strategis yang lebih penting bagi Indonesia. Bukan kepentingan Indonesia jika hal itu mengakibatkan eskalasi strategis antara AS dan Tiongkok, serta destabilisasi regional. Meskipun terdapat tumpang tindih antara klaim Indonesia atas ZEE di dekat Kepulauan Natuna dan klaim maritim Tiongkok, Indonesia bukan merupakan pengklaim wilayah di Laut China Selatan. Akibatnya, AS mengawasi interaksi Tiongkok dengan anggota ASEAN lainnya.

Secara keseluruhan, kerugian adanya Pivot to Asia bagi Indonesia ini sebanding dengan keuntungan yang dirasakan dalam aspek peningkatan manfaat ekonomi. Ini sangat ideal untuk Indonesia yang memiliki Presiden internasionalis dan Menteri Luar Negeri yang aktif. Namun, ada risiko yang melekat bagi Indonesia jika Pivot to Asia tersebut mengarah pada peningkatan ketegangan strategis di kawasan antara AS dan Tiongkok. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana

“hubungan kekuatan besar” yang baru mempengaruhi Indonesia dan kawasan (Kaplan 2021).

Pada akhirnya “Pivot to Asia” yang direncanakan sebagai perubahan fokus AS dari Timur-Tengah ke Asia-Pacific menjadi bumerang bagi AS. Tiongkok melihat ini sebagai ancaman langsung, Pivot to Asia juga gagal merangkul negara-negara di Asia-Pacific untuk bergabung atau mendekat ke AS. Bahkan, Tiongkok berhasil merespon ini melalui BRI dan berhasil merangkul negara-negara lain salah satunya Indonesia. Kemudian, American First memperparah kondisi AS di Asia.

2.3 Bagaimana Peran *China Dream* dalam Dinamika Hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan AS

Pada tahun 2013 secara bersamaan di Kazakhstan dan Indonesia, Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping secara resmi memperkenalkan proyek “One Belt and Road” (OBOR) yang kemudian berganti nama menjadi “Belt and Road Initiative” (BRI) (Khanna 2019). BRI merupakan bagian dari doktrin Tiongkok yang dikenal dengan “China Dream”. melalui “China Dream” Xi ingin membawa Tiongkok untuk menuju kemakmuran melalui peningkatan ekonomi serta penyatuan kembali Tiongkok (reunifikasi). Namun, dalam penerapannya “China Dream” berubah menjadi sebuah alat bagi Tiongkok untuk menyebarkan hegemoninya dengan membangun kerjasama atas nama BRI.

Proyek BRI dibangun bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta konektivitas, khususnya di negara-negara Asia. Secara singkat, Tiongkok ingin menghidupkan kembali perdagangan “jalur sutra” pada zaman dahulu. BRI

direncanakan akan selesai pada tahun 2049 yang sekaligus bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan “People's Republic of China” (PRC) atau Tiongkok. Tiongkok melalui BRI memberikan skema investasi serta hutang bagi negara yang menerima dan bergabung dalam proyek BRI. Secara resmi ada 71 negara yang telah bergabung dalam proyek BRI. Namun, dari laporan “Council on Foreign Relations” di tahun 2021 terdapat 139 negara yang bergabung dalam proyek BRI walaupun tidak melakukan penandatanganan kesepakatan secara resmi (Lew et al. 2021).

Proyek BRI berhasil mengantarkan Tiongkok ke tengah panggung perebutan hegemoni. Dari laporan *Lowy Institute*, perebutan pengaruh di Asia menunjukkan hasil yang cukup penting. Dalam tiga tahun terakhir, perebutan pengaruh yang melibatkan Tiongkok dan AS berjalan begitu dinamis. AS tetap menjadi negara dengan pengaruh yang paling besar di Asia namun, Tiongkok terus memperluas dan memperkuat pengaruhnya.

Sikap merangkul Tiongkok melalui kerjasama ekonomi di satu sisi sangat bertolak belakang dengan manuver Tiongkok yang sangat masif di Laut China Selatan melalui pembangunan pangkalan militer, melakukan patroli serta latihan militer sejak tahun 2015. Jika melihat dari sisi Tiongkok, Xi Jinping melalui “Grand Strategy China Dream” di tahun 2012 mencoba menerapkan dan menyebarkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok dan penyatuan kembali seluruh Tiongkok (Scobell et al. 2020). Ini merupakan sebuah ancaman nyata bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik yang merupakan rumah bagi banyak sekutu AS seperti Jepang, Australia, dan negara-negara di Asia Tenggara.

Bukan hanya itu, Tiongkok berhasil menggunakan kekuatannya untuk menekan negara lain agar sejalan dengan kepentingan politiknya. Tiongkok

menjadi mitra utama perdagangan bagi Australia. Di tahun 2019 ekspor Australia ke Tiongkok sebesar 110 miliar dollar AS atau setara dengan 40% total ekspor. Namun, kerjasama ekonomi antara Australia dan Tiongkok tidak diikuti dengan hubungan politik, Australia secara terang-terangan menganggap bahwa Tiongkok merupakan ancaman bagi stabilitas di kawasan Asia Pasifik, dan di tahun 2020 Australia mengajak semua pihak untuk menyelidiki asal usul Covid-19 yang diduga berasal dari Wuhan, Tiongkok. Tiongkok bereaksi keras dengan memberikan tekanan ekonomi kepada industri asal Australia, ini dilakukan dalam bentuk pelarangan pembelian batu bara, menghilangkan izin impor daging sapi dan menaikkan tarif impor anggur (Wilson 2021).

Ini bukanlah tindakan pertama dari Tiongkok untuk melemahkan ekonomi suatu negara atas perbedaan sikap atau pandangan politik. Dari catatan *Foreign Policy*, Tiongkok telah melakukan kebijakan serupa ke Korea Selatan, Kanada, Jepang, Lithuania, Mongolia, Filipina dan Norwegia. Negara kecil seperti Lithuania bahkan keluar dari kelompok kerjasama yang melibatkan negara di Eropa Timur dan Tiongkok dalam bentuk kelompok 17+1. Dampaknya Lithuania mendapatkan penolakan izin ekspor makanan serta penundaan layanan kereta api (Wilson 2021).

Di sisi lain Indonesia memiliki posisi penting bagi Tiongkok, karena Indonesia merupakan bagian dari dua koridor di dalam BRI. Proyek BRI dibagi ke dalam dua koridor ekonomi, yakni koridor darat “The Silk Road Economic Belt” dan koridor laut “The 21st Century Maritime Silk Road”. Koridor darat “The Silk Road Economic Belt” dibagi menjadi enam bagian, salah satunya adalah koridor *China-Indochina Peninsula Economic Corridor* (CICPEC). CICPEC menekankan

pada kerjasama perdagangan melalui ASEAN (Jinbo 2019). Perlu diketahui bahwa Indonesia memang bukan bagian langsung dari koridor CICPEC karena posisi geografisnya. Namun, secara mekanisme Indonesia yang merupakan bagian dari ASEAN memiliki andil besar dalam menentukan kebijakan yang dijalankan ASEAN (Natalegawa 2018).

Selanjutnya, koridor laut melalui “The 21st Century Maritime Silk Road” merupakan misi Tiongkok untuk menghubungkan kerjasama ekonomi Tiongkok sampai ke Laut Merah. Secara simbolis posisi Indonesia begitu penting, ini dibuktikan melalui peresmian koridor laut di tahun 2013 yang bertempat di Jakarta dan secara sekaligus diresmikan oleh Xi Jinping dan SBY. Tentunya ini bukan tanpa alasan, Tiongkok sadar bahwa Indonesia yang berada diantara Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan bahkan bagian dari klaim Tiongkok di LCS memiliki pengaruh penting bagi keberhasilan proyek BRI dan stabilitas di kawasan (“Belt and Road Initiative” n.d.).

2.4 Bagaimana Peran Global Maritime Fulcrum dalam Dinamika Hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan AS

Doktrin “Global Maritime Fulcrum” (GMF) atau Poros Maritim Global menjadi sebuah harapan dan jawaban bagi kompleksitas wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau serta diapit oleh negara-negara Hegemon. Secara tersirat, Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros atau pusat maritim dunia. Hal ini didasarkan pada kondisi Indonesia secara geografis terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di bagian yang menjadi perebutan antara

Tiongkok dan AS. Jokowi memperkenalkan GMF di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di tahun 2014 sebagai doktrin bagi Indonesia untuk mewujudkan kepentingan ekonomi dan keamanan (Ali and Sulistiyono 2020).

Jokowi sadar bahwa jika Indonesia dapat mengamankan wilayah laut, maka Indonesia memiliki modal besar untuk dapat menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia Tenggara dan Pasifik. Dalam implementasinya, terdapat lima misi yang ingin diwujudkan oleh Jokowi, yakni mengamankan serta mengelola secara mandiri sumber daya maritim, membangun infrastruktur dan konektivitas di sektor maritim, diplomasi maritim, membangun ulang budaya maritim serta memperkuat dan mengembangkan pertahanan laut Indonesia. GMF yang terdiri dari kebijakan dalam negeri dan luar negeri mengharuskan adanya sinergitas antar lembaga khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Laksmana 2019).

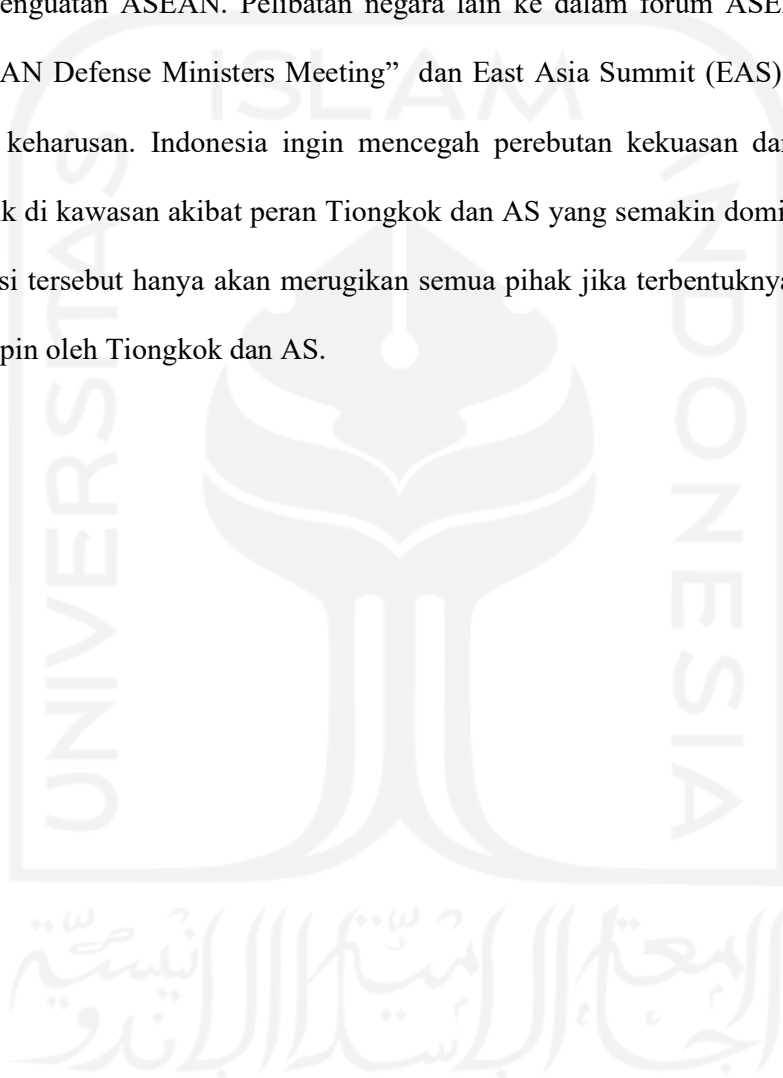
Di level regional melalui GMF, Indonesia mendorong stabilitas kawasan melalui “Indopacific Outlook” di tahun 2019 (Strangio 2020). Indonesia sebagai pemimpin ASEAN ingin menguatkan peran ASEAN di regional melalui kerangka “Indo-Pacific Outlook” sebagai respon dari sikap AS. Penguatan kerjasama pertahanan yang dibentuk AS bersama Jepang, India dan Australia dalam bentuk “Quad” untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di “Laut China Selatan” merupakan ancaman bagi stabilitas di regional (“Why ASEAN’s Indo-Pacific Outlook Matters” 2019). AS disatu sisi mencoba mencegah agresivitas Tiongkok agar terwujudnya Indo-Pasifik yang “bebas” namun, Indonesia melihat ini pada akhirnya akan mengarahkan pada terbentuknya poros antara AS dan Tiongkok.

Tiongkok dan AS melihat GMF sebagai sebuah kesempatan bagi negaranya untuk dapat memperkuat pengaruhnya di kawasan. Pemerintah Tiongkok bahkan secara terang-terangan menganggap bahwa GMF dapat berjalan beriringan dengan proyek BRI Tiongkok. Sedangkan Menteri Pertahanan AS, James Mattis saat melakukan lawatan ke Indonesia pada tahun 2018, memandang GMF merupakan sebuah doktrin yang dapat membuat Indonesia menjadi “titik tumpu maritim di kawasan Indo-Pasifik” (Laksmiana 2019).

Dalam penerapannya, banyak para analis melihat bahwa GMF berjalan dengan tidak signifikan. GMF menjadi sebuah retorika belaka yang dikemukakan oleh Jokowi, pada pelantikan masa kepresidenan kedua, Jokowi bahkan tidak menyampaikan lagi terkait visi GMF. Tindakan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak menganggap serius GMF sebagai sebuah mekanisme maupun doktrin dalam upaya perimbangan kekuasaan di kawasan (Laksmiana 2019).

Sebelumnya, di level kawasan setelah Indonesia ditunjuk menjadi ketua ASEAN di tahun 2011, Indonesia mencoba membangun hubungan yang lebih stabil di kawasan demi mencegah eskalasi dan pengaruh Tiongkok dan AS yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada masa pemerintahan SBY di tahun 2011 mengeluarkan doktrin kebijakan luar negeri “Dynamic Equilibrium” (keseimbangan dinamis). Doktrin ini menekankan bahwa stabilitas yang dibangun secara bersama-sama akan menghilangkan kekuatan dominan di kawasan. Tidak hanya itu interaksi yang damai antar tiap negara merupakan sebuah syarat untuk dapat membangun kepercayaan dan memberikan keuntungan (Poling 2013).

Marty sadar bahwa hanya dengan menghilangkan kekuatan dominan di kawasan Indo-Pasifik maka stabilitas dapat diwujudkan. Selanjutnya, meredam gejolak di kawasan harus dilakukan secara sistematis dan secara perlahan-lahan. Maka dari itu, keseimbangan di kawasan diwujudkan Indonesia melalui perluasan dan penguatan ASEAN. Pelibatan negara lain ke dalam forum ASEAN, seperti “ASEAN Defense Ministers Meeting” dan East Asia Summit (EAS) merupakan suatu keharusan. Indonesia ingin mencegah perebutan kekuasaan dan perluasan konflik di kawasan akibat peran Tiongkok dan AS yang semakin dominan, karena kondisi tersebut hanya akan merugikan semua pihak jika terbentuknya blok yang dipimpin oleh Tiongkok dan AS.

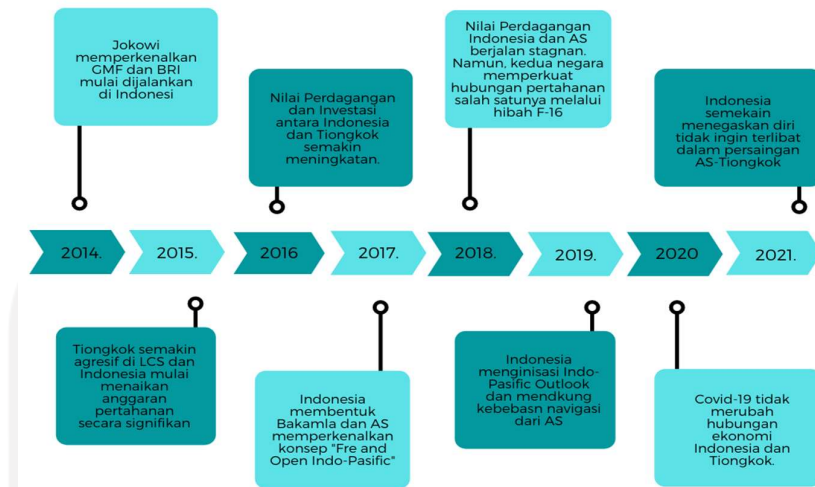


BAB III

Dinamika Hubungan Kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok dan AS di Sektor Ekonomi dan Pertahanan

Untuk menyempurnakan penelitian ini, penulis menggunakan bab 3 sebagai bagian dari analisis studi kasus. Menggunakan teori segitiga strategis, penulis memandang bahwa dinamika kerjasama Indonesia dalam kurun waktu 2014-2021 berjalan secara dinamis. Dalam teori segitiga strategis yang dijelaskan oleh Lowell Dittmer melalui papernya yang berjudul "The Strategic Triangle: An Elementary Game-Theoretical Analysis" salah satu syarat utama penggunaan teori ini adalah adanya pengakuan dari masing-masing aktor, pengakuan ini hadir dalam bentuk hubungan yang dijalin satu sama lain. selanjutnya, pembahasan diteruskan dengan analisis mengenai hubungan ketiga aktor, yang mana hubungan ini bisa berwujud positif maupun negatif, misalnya seperti adanya ketegangan atau kebuntuan militer. Selanjutnya adanya kerjasama seperti perdagangan. Maka dari itu penulis akan menjelaskan dan bagaimana pandangan diantara para aktor serta apakah hubungan yang terbentuk positif maupun negatif.

Gambar 3.1 Diagram Hubungan Indonesia terhadap AS dan Tiongkok



3.1. Bentuk Pengakuan dari Tiga Negara Sebagai Aktor *Legitimate*

Syarat utama dari penggunaan teori Segitiga Strategis adalah adanya pengakuan resiprokal dari ketiga aktor yang terlibat bahwa ketiganya merupakan aktor yang absah dengan kebijakan yang dipertimbangkan dengan mendalam dan matang. Dalam kasus segitiga strategis Indonesia – AS – Tiongkok, hal ini dapat dilihat dalam sejumlah bukti utama. Pertama, AS menerima Indonesia dan Tiongkok sebagai aktor yang absah dan merespon kebijakannya dalam wujud “Pivot to Asia” dan “Free Navigation”. Begitupun dua aktor yang lain yakni Tiongkok dan Indonesia yang merespon melalui doktrin ataupun skema kerjasama masing-masing. Selanjutnya, penulis akan menganalisis bagaimana hubungan antara dua faktor yakni Tiongkok dan AS direspon oleh aktor Indonesia melalui kerjasama positif melalui variabel nilai dan simetris.

Sebelumnya di tahun 2013 Tiongkok di bawah Xi Jinping secara mengejutkan membangun pulau baru di wilayah kepulauan Spratly dan Paracel

yang secara geografis dan hukum laut merupakan bagian dari Philipina dan Vietnam. Klaim sejarah digunakan Tiongkok sebagai dasar untuk menguasai 90% wilayah di Laut China Selatan. Bukan hanya membangun pulau baru, Tiongkok juga secara sistematis membangun pangkalan militer yang terdiri dari lapangan udara, pelabuhan, dan persenjataan. Secara konstitusional, mahaka arbitrase internasional di tahun 2016 mengeluarkan keputusan bahwa klaim Tiongkok di Laut China Selatan tidak sah (Delisle 2021).

Amerika Serikat merespon tindakan Tiongkok melalui prinsip “Freedom Of Navigation Operations” (FONOPs) di tahun 2016. Freedom of Navigation merupakan sebuah prinsip yang lahir atau didasarkan dari adanya hukum laut UNCLOS, Freedom of Navigations secara singkat memberikan akses bagi tiap negara untuk mengirimkan kapalnya melintasi perairan internasional tanpa harus mendapatkan gangguan. Amerika Serikat tidak bergerak sendiri di Laut China Selatan, Trump mengajak sekutu dekat Amerika Serikat yakni Australia, Jepang serta Eropa Barat (NATO) untuk dapat bekerjasama mengimbangi pengaruh Tiongkok .

Bukan hanya membangun pulau serta pangkalan militer, Tiongkok bahkan mengesahkan Undang-Undang terkait dengan keamanan melalui “Air Identification Zone”. Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada Tiongkok untuk dapat mengontrol LCS melalui udara. Secara singkat, pihak manapun yang ingin melewati kawasan LCS harus memberikan izin kepada otoritas Tiongkok (Vanhullebusch and Shen 2016). Tentunya ini merupakan sebuah penghinaan dan ancaman bagi dunia internasional khususnya AS.

Di sisi lain Pemerintah Indonesia tidak terlibat dalam klaim di Laut China Selatan yang melibatkan Tiongkok dan negara-negara di ASEAN, karena Indonesia menganut dan menaati hukum UNCLOS. Indonesia selalu menegaskan bahwa agar semua pihak patuh pada hukum yang ada yakni UNCLOS agar terciptanya stabilitas dan kawasan dan global. Namun, pergerakan yang begitu masif oleh Tiongkok di perairan yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia memaksa Indonesia bertindak untuk melakukan langkah preventif. Indonesia secara tegas menolak klaim Tiongkok atas Laut Natuna yang dianggap sebagai bagian dari Tiongkok berdasarkan dokumen *Nine Dash Line*.

Indonesia tidak hanya berfokus pada upaya diplomasi seperti tindakan mengecam maupun memanggil duta besar Tiongkok bagi Indonesia. Indonesia bahkan secara terbuka mendukung inisiasi yang dilakukan AS serta melakukan kerjasama pertahanan secara mendalam sejak tahun 2016 seperti hibah pesawat tempur sampai bantuan pembangunan pusat pelatihan militer. Namun, hubungan yang cukup mesra yang dijalin Indonesia dan AS nampaknya direspon negatif oleh Tiongkok. Tiongkok menganggap klaim di LCS bersifat legal karena didasarkan oleh historis yang telah ada dan menganggap setiap negara yang mencoba untuk merubah klaim tersebut maka akan dianggap sebagai ancaman bagi Tiongkok. Ini disampaikan secara berkala sejak dirinya dilantik menjadi presiden (Gingrich 2019).

Pada akhirnya ketiga aktor saling mengakui kehadiran masing-masing melalui doktrin, sikap nyata yang disampaikan secara berkala serta kerjasama antar dua aktor dalam rangka menekan satu sama lain. AS yang menganggap Tiongkok sebagai sebuah ancaman nyata memperkenalkan Pivot to Asia serta FONOS yang

didukung oleh Indonesia karena sesuai dengan kepentingannya, akan tetapi ini menjadi sinyal bagi Tiongkok dengan semakin memperkuat pengaruhnya di sektor ekonomi dan pertahanan melalui proyek BRI. Di sisi lain Indonesia tidak ingin berdiam diri, maka dari itu di tahun 2014 diperkenalkan Global Maritime Fulcrum agar posisi Indonesia jelas diantara persaingan AS dan Tiongkok. Namun, yang sangat mengejutkan kedua aktor yakni AS dan Tiongkok menyambut baik doktrin ini melalui pernyataan dan kerjasama secara langsung yang dilakukan sejak tahun 2014 sampai saat ini. Ini menandakan bahwa ketiga aktor berusaha mengakui dan mempengaruhi satu sama lain.

3.2 Sudut Pandang Ketiga Aktor

Jika pada bab 2 penulis fokus pada pengakuan dan strategis tiap aktor dalam melihat dan merespon satu sama lain. Maka di sub bab 3.2 Penulis akan memaparkan bagaimana sudut pandang ketiga aktor serta bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi tiap aktor dalam menjalin kerjasama atau hubungan dengan aktor lainnya. Namun, perlu digaris bawahi bahwa hubungan yang terbentuk dari ketiga aktor didasarkan pada variabel nilai dan simetris. Dalam sub bab ini penulis akan menjabarkan syarat dan teori segitiga strategis. Variabel nilai (negatif dan positif) serta simetris (hubungan ekonomi/perdagangan yang adil serta kebuntuan militer). Hubungan positif dan negatif dalam variabel nilai merupakan sebuah indikator bahwa ketiga negara telah merespon sikap atau hubungan satu sama lain melalui kerjasama perdagangan atau ekonomi serta kebuntuan militer yang terbentuk akibat strategi di awal.

3.2.1 Sudut Pandang Tiongkok terhadap Indonesia dan AS

Tiongkok tampaknya cenderung melihat bahwa hubungan AS-Tiongkok akan tetap buruk di masa mendatang. Meskipun demikian, Presiden Xi Jinping dan para pengamat lainnya berpendapat bahwa waktu dan momentum berpihak pada Tiongkok untuk menjadi pemain utama politik global. Pembuat kebijakan Tiongkok tahu bahwa untuk mencapai tujuan nasional negara mereka, mereka harus mengatasi rintangan. Untuk mencapai hal ini, Tiongkok tampaknya mengejar strategi jangka menengah tiga cabang. Pertama, mempertahankan lingkungan eksternal yang tidak bermusuhan untuk fokus pada prioritas domestik. Kedua, mengurangi ketergantungan pada AS sambil meningkatkan ketergantungan pada Tiongkok oleh seluruh dunia. Ketiga, memperluas jangkauan pengaruh Cina ke luar negeri. Pada saat yang sama, aktivitas Tiongkok memicu reaksi keras baik di dalam negeri maupun internasional. Apakah Tiongkok dapat menerapkan apa yang telah dipelajarinya dari lingkaran umpan balik ini untuk mengatasi kerentanannya sendiri adalah pertanyaan terbuka yang hanya dapat dijawab oleh Tiongkok.

Memahami penilaian Tiongkok terhadap perubahan signifikan dalam hubungan AS-Tiongkok dan lingkungan globalnya tidak pernah sepenting ini. Aktivitas Tiongkok sekarang memiliki pengaruh langsung pada orang-orang di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, berkat jangkauan ekonominya yang sangat besar dan bobot strategis yang terus bertambah. Namun, semakin sulit untuk memahami dengan jelas asumsi dan keputusan apa yang mengarahkan pendekatan Tiongkok yang berkembang ke AS dan seluruh dunia dalam beberapa hal. Banyak argumen AS baru-baru ini mengenai ambisi Tiongkok telah menghasilkan lebih banyak masalah atau tantangan daripada peluang.

Hingga Januari 2020, ketika kedua pihak menyelesaikan diskusi tentang pakta perdagangan "fase-1", penilaian terhadap sikap Tiongkok terhadap AS ini hampir tidak berubah. Dinamika bilateral berkembang secara dramatis dalam minggu-minggu berikutnya. Dihadapkan dengan biaya kemanusiaan dan keuangan dari ekspansi COVID-19 yang tidak terkendali, Presiden Trump beralih dari memuji Xi Jinping sebagai teman menjadi menggambarkan Tiongkok sebagai musuhnya dan sumber sebagian besar penderitaan Amerika. Tiongkok, pada bagiannya, sebagian besar membalas, mengarahkan meriam propagandanya pada tanggapan Amerika terhadap krisis kesehatan masyarakat dan tantangan sosial, ekonomi, dan politik berikutnya. Pada bulan-bulan berikutnya, pola balas dendam terbentuk, Tiongkok mengadopsi undang-undang dan aturan untuk pembatasan ekspor, penyaringan investasi keamanan nasional, sanksi visa terkait kebijakan, dan ketentuan ekstrateritorial dalam undang-undang dan peraturan administratif, serupa dengan Amerika Serikat.

Hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat telah memburuk ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya, itu bermuara pada kesalahpahaman mendalam tentang Tiongkok di antara para politisi AS. Beberapa orang menganggap Tiongkok sebagai apa yang disebut sebagai ancaman terbesar, dan strategi Tiongkok mereka didasarkan pada kesan yang salah ini. Apa yang terjadi menunjukkan bahwa upaya Amerika Serikat untuk menekan Tiongkok dan memulai Perang Dingin baru tidak hanya merugikan kepentingan kedua bangsa, tetapi juga telah mendatangkan malapetaka pada tatanan global.

Peluang Tiongkok untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengunduran diri Trump dari "posisi kepemimpinan global" asli AS sangat tipis, dan bahkan lebih tipis daripada yang diproyeksikan oleh banyak pengamat domestik dan internasional. Daya tarik "soft power" Tiongkok di dunia, serta sumber daya dan pengalaman yang dimilikinya, terbatas, dan kesulitan domestik dan internasional yang akan dihadapi Tiongkok, terutama kompleksitas yang dihasilkan oleh pandemi virus corona, adalah signifikan. Selain menghormati urusan dalam negeri Tiongkok, Xi menjelaskan bahwa memperlakukan Tiongkok dengan hormat mengharuskan Amerika Serikat mengakui Tiongkok sebagai setara di panggung internasional. Dalam praktiknya, ini berarti memasukkan Tiongkok dalam inisiatif global yang dipimpin AS, serta inisiatif teman dan mitranya. Xi memberi tahu Biden bahwa Tiongkok telah menunjukkan rasa hormat kepada AS dengan menjaga pintu tetap terbuka untuk 'inisiatif global yang disarankan Tiongkok.' 'Kami berharap sebaliknya juga benar,' katanya cepat.

Di sisi lain hubungan Tiongkok dan Indonesia memasuki fase baru, Indonesia memiliki posisi penting bagi Tiongkok, karena Indonesia merupakan bagian dari dua koridor di dalam BRI. Proyek BRI dibagi ke dalam dua koridor ekonomi, yakni koridor darat "The Silk Road Economic Belt" dan koridor laut "The 21st Century Maritime Silk Road". Koridor darat "The Silk Road Economic Belt" dibagi menjadi enam bagian, salah satunya adalah koridor *China-Indochina Peninsula Economic Corridor* (CICPEC). CICPEC menekankan pada kerjasama perdagangan melalui ASEAN (Jinbo 2019). Perlu diketahui bahwa Indonesia memang bukan bagian langsung dari koridor CICPEC karena posisi geografisnya. Namun, secara mekanisme Indonesia yang merupakan bagian dari ASEAN

memiliki andil besar dalam menentukan kebijakan yang dijalankan ASEAN (Natalegawa 2018).

Selanjutnya, koridor laut melalui “The 21st Century Maritime Silk Road” yang merupakan misi Tiongkok untuk menghubungkan kerjasama ekonomi Tiongkok sampai ke Laut Merah. Secara simbolis posisi Indonesia begitu penting, ini dibuktikan melalui peresmian koridor laut di tahun 2013 yang bertempat di Jakarta dan secara sekaligus diresmikan oleh Xi Jinping dan SBY. Tentunya ini bukan tanpa alasan, Tiongkok sadar bahwa Indonesia yang berada diantara Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan bahkan bagian dari klaim Tiongkok di LCS memiliki pengaruh penting bagi keberhasilan proyek BRI dan stabilitas di kawasan (Belt and Road Initiative 2013).

Melalui pola segitiga romantis dalam teori segitiga strategis dapat dilihat bahwa Tiongkok melihat AS sebagai sebuah ancaman bagi upaya Tiongkok untuk memperkuat pengaruh atau hegemoninya. AS yang secara terbuka menganggap Tiongkok sebagai sebuah ancaman nyatanya direspon Tiongkok melalui sikap yang semakin agresif di sektor ekonomi dan pertahanan. Namun, di lain sisi Tiongkok berhasil menyakinkan Indonesia untuk menjalin hubungan yang dekat melalui skema kerjasama ekonomi dan investasi melalui proyek BRI. Indonesia pun dianggap sangat penting bagi Tiongkok atas dasar geografis dan potensi ekonominya. Maka dari itu Tiongkok berusaha merangkul Indonesia dengan baik melalui sektor ekonomi, dan tidak terlalu gegabah untuk mempertahankan klaimnya di LCS.

3.2.2 Sudut Pandang AS terhadap Indonesia dan Tiongkok

Sikap Tiongkok yang semakin agresif di LCS melalui pembangunan pulau sampai peningkatan anggaran pertahanan dianggap ancaman oleh AS. AS merespon tindakan Tiongkok melalui prinsip “Freedom Of Navigation Operations” (FONOPs) di tahun 2016. Freedom of Navigation merupakan sebuah prinsip yang lahir atau didasarkan dari adanya hukum laut UNCLOS, Freedom of Navigations secara singkat memberikan akses bagi tiap negara untuk mengirimkan kapalnya melintasi perairan internasional tanpa harus mendapatkan gangguan. Amerika Serikat tidak bergerak sendiri di Laut China Selatan, Trump mengajak sekutu dekat Amerika Serikat yakni Australia, Jepang serta Eropa Barat (NATO) untuk dapat bekerjasama mengimbangi pengaruh Tiongkok .

Peningkatan anggaran pertahanan yang dilakukan Tiongkok bukan tanpa alasan. Tiongkok menyadari bahwa kapabilitas militernya membuat negara lain dapat dengan mudah ikut campur dalam urusan domestiknya. Maka dari itu, perubahan kekuatan militer merupakan jalan terbaik bagi Tiongkok untuk dapat mempertahankan kepentingan dan kedaulatannya. Dalam penerapannya, melalui peningkatan ekonomi Tiongkok berhasil meningkatkan kapabilitas militernya (China Power 2021). Proyek BRI yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi serta konektivitas antar wilayah dapat berjalan secara beriringan dengan kepentingan pertahanan Tiongkok.

Di sisi lain, Presiden Joe Biden yang merupakan Mantan Wakil Presiden di era Obama berusaha mengambil kebijakan yang lebih baik daripada para pendahulunya. Biden sadar bahwa pada masa sebelumnya AS gagal dalam rangka mencegah agresivitas Tiongkok, maka dari itu Biden berusaha menyempurnakan

kebijakan AS melalui Cetak Biru Posisi AS di Indo-Pasifik (“Indo-Pacific Strategy 2022).

“Kami memperdalam lima aliansi perjanjian regional kami—dengan Australia, Jepang, ROK, Filipina, dan Thailand—dan memperkuat hubungan dengan mitra regional terkemuka, termasuk India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Vietnam, dan Kepulauan Pasifik. Kami juga akan mendorong sekutu dan mitra kami untuk memperkuat hubungan mereka satu sama lain. Kami akan membina hubungan keamanan antara sekutu dan mitra kami di kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya, termasuk dengan menemukan peluang baru untuk menghubungkan basis industri pertahanan kami, mengintegrasikan rantai pasokan pertahanan kami, dan co-memproduksi teknologi kunci yang akan menopang keuntungan militer kolektif kita.”

Keagresifan Tiongkok di Laut China Selatan dan komitmen Amerika Serikat untuk menegakan prinsip “Rules Based Order” membuat AS berada pada posisi yang begitu sulit. AS tidak ingin terlibat dalam perang terbuka dengan Tiongkok karena mereka sadar bahwa dampak yang ditimbulkan begitu besar, baik dari segi keamanan maupun ekonomi. Namun, membiarkan Tiongkok terus melakukan “ekspansi” dan semakin menyudutkan aliansinya di Indo-Pasifik merupakan sebuah tindakan yang ceroboh. Maka dari itu AS berusaha mengambil kebijakan yang sekiranya tepat untuk menahan Tiongkok tanpa harus melakukan perang terbuka.

Disisi lain, pada saat ini Amerika Serikat akan tetap memandang Indonesia sebagai wilayah yang penting dalam persaingan antara AS-Tiongkok. Ini didasarkan pada letak geografis Indonesia yang berada di tengah-tengah Indo-

Pasifik. Bukan hanya letak geografis yang membuat Indonesia begitu penting namun juga potensi ekonominya. Maka dari itu posisi maupun sikap Indonesia menentukan keseimbangan wilayah Indo-Pasifik. Tiongkok tidak akan mampu menggantikan hubungan keamanan Amerika Serikat dan Indonesia, walaupun Tiongkok mendominasi di sektor ekonomi. Hubungan keamanan yang telah dijalin dalam kurun waktu yang cukup lama menempatkan Amerika Serikat dan sekutunya menjadi distributor terbanyak bagi persenjataan serta mitra pendidikan dan militer Indonesia (Laksmana 2021).

Melalui pola segitiga romantis Tiongkok digambarkan sebagai sebuah ancaman bagi AS, akan tetapi disaat bersamaan Indonesia menjadi mitra bagi AS untuk menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Sikap Tiongkok yang semakin agresif di LCS semakin memperkuat keyakinan AS bahwa Tiongkok merupakan ancaman terbesar saat ini dan kerjasama dari banyak pihak salah satunya Indonesia merupakan sebuah keharusan. Posisi Indonesia begitu penting bagi AS dan Tiongkok, khususnya bagi AS jika Indonesia mendukung secara penuh semua inisiasi serta kerjasama yang di ditawarkan AS maka stabilitas di LCS akan semakin lebih dekat.

Oleh karena itu dalam sudut pandang segitiga strategis ketiga aktor melihat satu sama lain sebagai aktor yang memiliki legitimasi. Legitimasi ini diperoleh melalui pengakuan doktrin satu sama lain, pernyataan resmi maupun sikap merasa terancam yang ditimbulkan oleh pihak lain. Maka dari itu di sub bab berikutnya penulis akan menjelaskan posisi dan upaya Indonesia dalam membangun hubungan yang positif terhadap Tiongkok dan AS dalam variabel nilai dan simetrikal.

3.2.3 Sudut Pandang Indonesia terhadap Tiongkok dan AS

Jokowi mencoba mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia menggunakan prinsip politik Bebas Aktif. Jokowi sadar jika membiarkan AS dan Tiongkok membangun blok di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik atau bergabung dengan salah satu pihak hanya akan memperburuk situasi. Netralitas Indonesia menjadi sangat penting agar stabilitas di kawasan dapat dipertahankan. Walaupun di satu sisi Indonesia sangat tergantung dengan Tiongkok di sektor ekonomi dan AS di sektor keamanan. Sekretaris Negara AS Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi secara terbuka menunjukkan upaya persuasi agar negara-negara di ASEAN, salah satunya Indonesia untuk memberikan dukungan dan menentukan sikap dalam konflik LCS.

Namun, Retno Marsudi yang merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengambil bagian dari persaingan yang melibatkan Tiongkok dan AS, karena ini dianggap hanya akan merugikan Indonesia dan membuat stabilitas di kawasan menjadi terganggu. Ini dibuktikan melalui pernyataan yang disampaikan pada September 2020. “Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini.” Dalam kesempatan yang berbeda yakni pada pertemuan majelis umum PBB di tahun 2020 yang sekaligus menjadi pidato pertama Jokowi di PBB, beliau menyatakan bahwa, “Perang tidak akan menguntungkan siapa pun. Tidak ada gunanya merayakan kemenangan di antara reruntuhan. Tidak ada gunanya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam,” Jokowi kembali mempertegas posisi Indonesia di KTT ASEAN-

China tahun 2021 “Keberhasilan kami dalam membangun kemitraan yang kuat, antara lain, akan sangat dipengaruhi oleh cara kami mengelola Laut China Selatan.”

Dan terakhir Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa di tahun 2019 menyatakan, “Indonesia tidak unik dalam arti memiliki hubungan ekonomi yang sangat dekat dan substantif dengan Tiongkok tetapi pada saat yang sama memiliki hubungan persahabatan, tidak hanya ekonomi tetapi juga politik, hubungan keamanan dengan Amerika Serikat.” Pada akhirnya dua negara hegemon yang semakin aktif di wilayah Asia nampaknya direspon Jokowi melalui kebijakan “Poros Maritim Global” untuk mengamankan wilayah laut baik dari segi keamanan maupun ekonomi. Ini menjadi pertanyaan apakah Indonesia mampu menempatkan diri dengan baik diantara pertarungan AS dan Tiongkok. Ketergantungan yang cukup besar dengan Tiongkok di sektor ekonomi dan ancaman nyata di sektor keamanan mengharuskan Indonesia memperkuat kerjasama dengan AS. Jika Indonesia mengikuti jejak AS dan sekutunya secara langsung melalui diversifikasi ekonomi dan memperkuat kerjasama pertahanan. Tentunya ini akan mempengaruhi geopolitik di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Disisi lain, salah satu pilar yang digunakan di dalam grand strategy “Global Maritime Fulcrum” (GMF) adalah memperkuat pertahanan di wilayah maritim. Namun, pemerintah hanya fokus pada pembangunan dan perbaikan pelabuhan. Kondisi AL tidak begitu baik, ini dibuktikan dengan angkatan laut hanya memiliki 113 kapal patroli, 11 pangkalan perang laut, 13 kapal fregat, 20 korvet serta 5 kapal selam dengan total perairan Indonesia seluas 3,25 juta km², maka setiap kapal selam memiliki tugas untuk menjaga 650 ribu km² perairan Indonesia dan setiap

kapal fregat dan korvet harus menjaga setiap 98 ribu km² perairan Indonesia. Selanjutnya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki tugas untuk melakukan patroli di wilayah kedaulatan Indonesia hanya memiliki 10 kapal. Serta, Indonesia tidak memiliki kapal induk untuk mengangkut pesawat tempur serta kapal perusak.

Selanjutnya anggaran pertahanan Indonesia kurang dari 1% PDB nya, secara spesifik sejak tahun 2014, dengan pertumbuhan ekonomi 5% setiap tahunnya, Indonesia hanya mengalokasikan 0,7 - 0,9% untuk sektor pertahanan. Sedangkan anggaran pertahanan rata-rata dunia berada pada 2,2% dan negara di Asia Tenggara 2-3%. Dari tulisan yang diterbitkan CSIS Indonesia pada tahun 2021, Indonesia mengalokasikan 134,2 triliun untuk pertahanan dengan kenaikan sebesar 14%. Namun, 55% anggaran pertahan atau sekitar 72,6 triliun digunakan untuk membayar gaji prajurit serta keperluan manajemen, dan hanya 29% atau setara dengan 39 triliun yang digunakan untuk pembelian alutsista. Ini merupakan angka yang sangat tidak proporsional.

Dengan kekuatan pertahanan yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Angkatan Laut (AL), sangat sulit bagi Indonesia untuk dapat menegakkan kedaulatannya di LCS. Seperti yang diketahui bahwa kekuatan militer Tiongkok sangat besar, Tiongkok menempati posisi ke 3 sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia serta setiap tahunnya. Tiongkok terus meningkatkan anggaran pertahanan dengan jumlah yang besar. Sikap Indonesia yang kurang tegas dalam menghadapi Tiongkok di LCS bukan hanya disebabkan oleh kekuatan pertahanan Indonesia yang lemah namun ada dimensi ekonomi. Tiongkok merupakan mitra utama perdagangan bagi Indonesia, kreditur terbesar

keempat, serta investor nomor tiga setelah Singapura dan Jepang. Maka dari itu mitra baru yang kuat sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam rangka mengimbangi Tiongkok di LCS. Mengutip dari pernyataan Hatta “Indonesia dapat mendayung diantara dua karang” Indonesia tidak perlu memilih antara Tiongkok dan AS namun, Indonesia dapat merangkul kedua negara. Memperkuat hubungan pertahanan dengan AS tidak berarti memutus atau mengurangi kerjasama ekonomi dengan Tiongkok, begitupun sebaliknya. Indonesia dapat mengambil dua keuntungan yakni ekonomi dan pertahanan.

3.3 Perkembangan Hubungan Kerjasama Ekonomi dan Pertahanan antara Indonesia terhadap Tiongkok dan AS dalam Variabel Nilai (Positif dan Negatif)

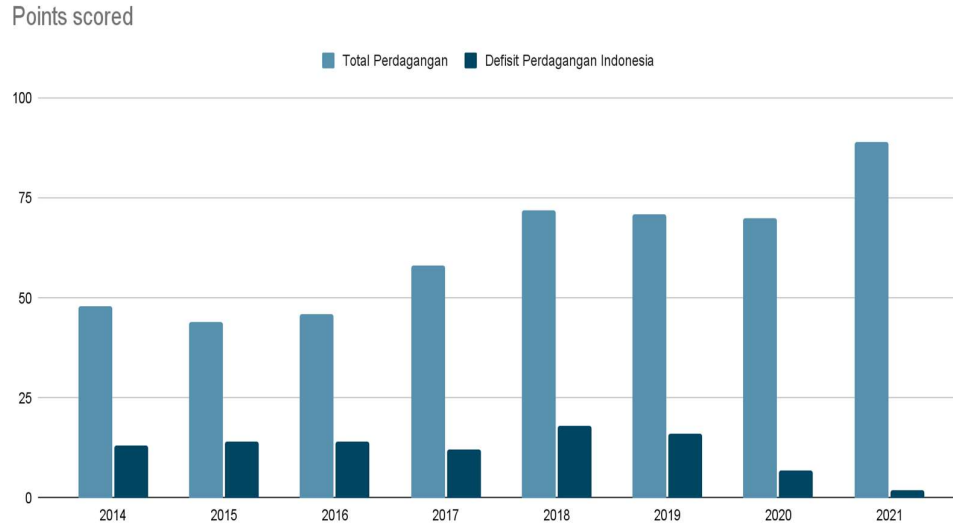
Pada sub bab 3.3 penulis akan menjelaskan bagaimana variabel nilai dalam segitiga strategis diwujudkan Indonesia melalui kerjasama antara Indonesia terhadap Tiongkok dan AS yang pada akhirnya melahirkan hubungan positif. Namun, perlu digaris bawahi bahwa hubungan positif ini hanya dijalin antara Indonesia terhadap Tiongkok dan AS, bukan antara Tiongkok dan AS. Di sub bab 3.1 dan 3.2 telah dijelaskan bahwa hubungan antara AS dan Tiongkok berada pada fase yang negatif. Kedua negara secara terbuka mengakui bahwa pihak lain sebagai ancaman nyata. AS menolak dan menekan Tiongkok di LCS melalui pernyataan diplomatik sampai bekerja sama militer. Maka dari itu Indonesia berusaha memanfaatkan ini untuk membangun hubungan yang positif dengan AS dan Tiongkok melalui kerjasama ekonomi dan pertahanan.

3.3.1 Kerjasama Ekonomi Positif Indonesia - Tiongkok

Kebijakan “Global Maritime Fulcrum” merupakan doktrin serta visi Jokowi untuk membawa Indonesia menjadi negara maritim global, ini didasarkan oleh Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 16 ribu, serta posisi Indonesia yang diapit oleh Samudra Pasifik dan Hindia. “Global Maritime Fulcrum” memiliki tujuh pilar sebagai penyokong keberhasilan; dimulai dari infrastruktur maritim, diplomasi maritim, budaya maritim, pertahanan dan penegakan hukum, pemerintahan maritim, sumber daya manusia berbasis maritim dan terakhir perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Tiola 2019). Namun, kebijakan ini membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun infrastruktur. Indonesia membutuhkan kurang lebih Rp 5,500 triliun dalam kurun waktu 5 tahun yakni 2015-2019. Namun, Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Negara (APBN) hanya mampu memenuhi 40% atau setara dengan Rp 3.300 triliun. Maka dari itu Indonesia membutuhkan mitra yang dapat mewujudkan visi ini yakni Tiongkok melalui proyek BRI (CSIS 2020).

Pada tahun pertama masa kepresidenan Jokowi, Jokowi dan Xi Jinping secara resmi telah melakukan sembilan kali pertemuan bilateral di Jakarta maupun Beijing. Ini merupakan catatan yang begitu menarik untuk melihat bagaimana posisi Indonesia dalam melihat Tiongkok maupun sebaliknya. Dari data yang didapatkan di Kementerian Perdagangan, dalam enam tahun terakhir sejak tahun 2015, hubungan perdagangan Indonesia dengan Tiongkok semakin meningkat.

**Tabel 3.1 Perdagangan Indonesia dan Tiongkok dalam kurun waktu
2014-2021**



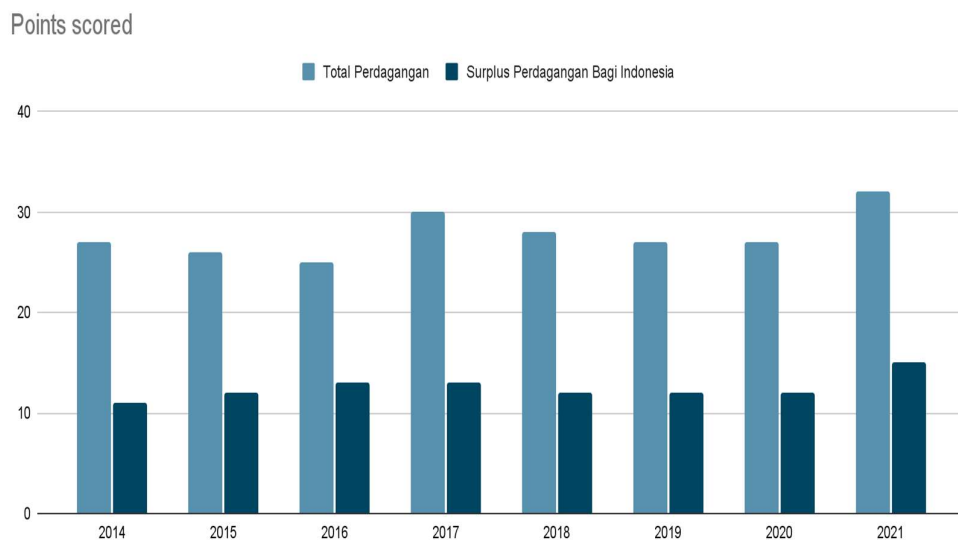
Catatan: Skala 0-100 dalam bentuk dollar AS

Sumber: Kementerian Perdagangan (Perdagangan 2021).

Dari data yang ditampilkan sebelumnya, Tiongkok menjadi mitra perdagangan utama Indonesia dalam tujuh tahun terakhir. Penandatanganan “Strategic Partnership” di tahun 2013, menjadi sebuah jalan pembuka bagi kedua negara untuk menjalin kerjasama yang lebih erat. Namun, hal berbeda terjadi antara Indonesia dan AS, terdapat stagnasi perdagangan antara Indonesia dan AS, hal ini dapat dilihat dari hubungan yang terjalin antara Jokowi dan Trump. Trump tidak pernah melakukan kunjungan kenegaraan secara resmi maupun tidak resmi ke Indonesia. Dalam hal ini Jokowi melakukan hal yang sama. Tindakan Ini sangat bertolak belakang dengan yang dilakukan Xi Jinping. Xi Jinping secara resmi telah melakukan sembilan kali pertemuan bilateral di Jakarta maupun Beijing di tahun pertama kepemimpinan Jokowi (Mcrae 2015).

Namun, hal yang sebaliknya terjadi antara Indonesia dan AS. Dari laporan *United States Bureau Census* sejak tahun 2014 sampai 2021 terjadi stagnasi perdagangan antara Indonesia dan AS. Nilai perdagangan kedua negara tidak pernah melewati 40 miliar dollar, bahkan rekor tertinggi hanya mencapai 32 miliar dollar di tahun 2021. Di tahun 2014 total perdagangan kedua negara mencapai 27,5 miliar dolar dengan surplus mencapai 11 miliar dollar. Di tahun 2020 total perdagangan kedua negara mencapai 27 miliar dolar dengan surplus perdagangan mencapai 12 miliar dolar. Dan terakhir di tahun 2021 total perdagangan kedua negara mencapai 32 miliar dolar dengan surplus perdagangan mencapai 15 miliar dolar.

Tabel 3.2 Perdagangan Indonesia dan AS dalam kurun waktu 2014-2021



Sumber: Dari laporan United States Bureau Census (Division 2021)

Stagnasi kerjasama Indonesia dan AS bukan tanpa alasan. Trump melalui kebijakan “American First” ingin membangun narasi bahwa selama ini AS

dirugikan oleh mitra dagangnya. Trump menuduh bahwa Indonesia dan 15 negara mitra dagang AS telah melakukan kecurangan. Ini didasarkan pada defisit perdagangan AS dengan 16 negara. Maka dari itu di tahun 2017 untuk pertama kalinya dalam sejarah AS, pemerintah federal secara resmi mengeluarkan perintah *executive order* yang berisi kajian ulang serta identifikasi terhadap mitra dagang AS yang dianggap melakukan “kecurangan” dalam waktu 90 hari (“Trump Tuduh Indonesia ‘Curang’ - Infografik Katadata.Co.Id” n.d.). Ini pada akhirnya menjadi dasar bagi pemerintahan Trump untuk melakukan perang dagang dengan Tiongkok di tahun 2018. Disisi lain memburuknya hubungan Indonesia dengan AS dapat dilihat dari kebijakan Jokowi yang hanya memfokuskan pada pemenuhan kepentingan ekonomi.

Disisi lain investasi Tiongkok menjadi investor terbesar kedua, dan hanya kalah dari Singapura. Menteri Perindustrian Indonesia Agus Gumiwang melalui website resmi Kementerian Perindustrian memberikan pernyataan mengenai pencapaian pemerintah Jokowi dalam menarik investasi asing. Agus menyatakan bahwa “Total nilai investasi selama periode lima tahun pertama ini bahkan lebih besar dari nilai investasi yang terakumulasi selama 10 tahun pada kurun waktu 2005-2014” (“Kemenperin: 7 Tahun Pemerintahan Jokowi, Investasi Dan Ekspor Industri Kian Bergeliat” n.d.).

Sejak tahun 2015 - 2020 Tiongkok telah melakukan investasi di Indonesia sebanyak 17,29 miliar dollar, dengan peningkatan yang sangat luar biasa. Di tahun 2015 investasi Tiongkok di Indonesia hanya 0,63 miliar dollar namun, terjadi peningkatan 559% di tahun 2020 dengan total 3,51 miliar dollar. Jika dihitung

dalam 5 tahun terakhir Tiongkok berada pada posisi ketiga di belakang Jepang dengan total investasi 24,67 miliar dollar dan Singapura 46,50 miliar dollar. Dan pada triwulan III tahun 2020, Tiongkok berhasil menggeser Jepang sebagai investor kedua terbesar di Indonesia (Media 2021).

Sehingga, dalam kurun waktu 2015- 2020 berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi Tiongkok telah membuka lapangan pekerjaan sebesar 228.563 ribu dengan total proyek 10.083. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya ada 38 ribu lapangan kerja baru dan 1.680 proyek yang dijalankan antara Indonesia dan Tiongkok. Terdapat tiga sektor utama investasi Tiongkok di Indonesia yakni Pertama, industri logam dasar, barang logam sebanyak 42% dengan nilai investasi 7,32 miliar dollar. Kedua, transportasi, telekomunikasi serta gudang sebanyak 20% dengan nilai investasi 3,43 miliar dollar. Terakhir, gas, air dan listrik sebanyak 19% dengan nilai investasi 3,32 miliar dollar (Media 2021).

Hubungan kedua negara tidak hanya berfokus pada kerjasama ekonomi akan tetapi termasuk hutang. Dari laporan Bank Indonesia (BI), di tahun 2021 terjadi kenaikan utang luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia, kenaikan ini sebesar 2,7% yakni dengan total utang sebesar 432 miliar dolar AS atau setara dengan 5,971,3 triliun rupiah. Tidak hanya itu, data yang dirilis oleh BI melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) di tahun 2021 menyatakan bahwa total pinjaman Tiongkok kepada Indonesia sebesar 21,12 miliar dolar atau setara kurang lebih 300 triliun. Satu tahun sebelumnya yakni di tahun 2019 dari laporan BI, total pinjaman yang Tiongkok berikan pada Indonesia sebesar 17,75 miliar

dollar atau jika diakumulasikan ke rupiah sebesar 274 triliun rupiah. Ini membuat Tiongkok menjadi pemberi utang terbesar ke 4 bagi Indonesia (Kompas 2021).

Pada akhirnya Indonesia berusaha memanfaatkan hubungan yang negatif antara AS dan Tiongkok melalui kerjasama ekonomi. Memihak secara langsung atau terbuka antara AS dan Tiongkok tidak menguntungkan. Maka dari itu Indonesia sadar bahwa harus memposisikan diri dengan baik. Tiongkok yang menawarkan sebuah penawaran yang sangat menguntungkan melalui proyek BRI harus diterima oleh Indonesia demi meningkatkan perekonomiannya. Sikap ini juga mempertegas lemahnya pengaruh AS di sektor ekonomi atau cenderung pasif dalam rangka merangkul negara di Asia khususnya Indonesia.

3.3.2 Kerjasama Pertahanan Positif Indonesia -AS

Di Januari 2020, kapal *coast guard* Tiongkok atau kapal penjaga pantai Tiongkok memasuki wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Diketahui bahwa kapal *coast guard* Tiongkok masuk bersama dengan 30 kapal ikan berbendera Tiongkok. Kemudian di bulan September 2020, kapal *coast guard* Tiongkok kembali memasuki wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Bakamla yang bertugas, secara tegas mengusir kapal *coast guard* dan kapal ikan berbendera Tiongkok, namun ditolak dengan alasan telah berlayar sesuai dengan aturan yang ada yakni berdasarkan klaim “Nine Dash Line” (Puji 2020). Kemudian, pada September 2021, dari laporan Bakamla Tiongkok kembali mengirimkan kapal *coast guard*-nya untuk memasuki wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Bahkan terdapat ratusan

kapal asing termasuk kapal berbendera Tiongkok yang memasuki wilayah Indonesia tanpa terdeteksi radar.

Di tahun 2021 saat Retno Marsudi saat menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, di Jakarta, dirinya menyampaikan bahwa "Saya menyampaikan kembali mengenai pentingnya menjaga Laut China Selatan, sebagai laut yang damai dan stabil, "Untuk mencapainya, hanya satu hal yang harus dilakukan oleh semua negara, yaitu menghormati dan menjalankan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982" (Mediatama 2021).

Pemerintah Indonesia yang berusaha menunjukkan keseriusan terhadap masyarakat dan dunia internasional, dengan cara simbolis dan diplomatik. Namun, usaha ini dianggap oleh banyak pihak tidak terlalu efektif. Kekuatan Tiongkok yang begitu besar dari segi militer menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya di isu Laut China Selatan. Serta, ditambah dengan keadaan dari militer Indonesia yang kurang kuat. Kapabilitas militer yang rendah menjadi salah satu pertimbangan utama bagi Jokowi untuk tidak melakukan konfrontasi secara langsung dengan Tiongkok dan cenderung memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan AS.

Dalam rangka mencegah agresivitas Tiongkok di LCS, Indonesia dan AS membangun komunikasi sampai kerjasama dalam bentuk hubungan bilateral serta mekanisme yang disediakan ASEAN. Respon Indonesia di awal agresivitas Tiongkok di LCS terkesan lambat. Indonesia mencoba membangun sikap netral atas klaim Tiongkok di LCS. Ini dibuktikan dengan kemenangan Filipina atas Tiongkok di pengadilan arbitrase atas kasus LCS di tahun 2016. Indonesia sebagai pemimpin ASEAN dan memiliki masalah yang serupa dengan Filipina terkesan diam.

Dari laporan *IHS Jane's Navy International*, Indonesia sejak tahun 2016 telah melakukan komunikasi dengan AS terkait dengan pertahanan di LCS. Perwira Angkatan Laut Indonesia melakukan kunjungan ke AS dalam rangka mencari dukungan dalam bentuk pendanaan yang digunakan untuk memperbaiki Pangkalan Angkatan Laut di daerah yang berdekatan dengan LCS. Terdapat dua Pangkalan Angkatan Laut yang akan ditingkatkan yakni di Natuna dan Piabung di Lampung (Patunru, Pangestu, and Basri 2018). Perlu diketahui di tahun yang sama Indonesia melakukan komunikasi bilateral dengan sekutu AS yang berada di Indo-Pasifik yakni Australia terkait keamanan di LCS. Para analis menganggap bahwa komunikasi ini akan mengarahkan kedua negara untuk membentuk “Joint Patrols” atau patroli bersama. Namun, kabar ini dibantah oleh Menteri Luar Negeri Australia yakni Julie Bishop.

Gambar 3.4 Bagan bentuk kerjasama pertahanan antara AS dan Indonesia dalam kurun waktu 2014-2021



Di tahun 2018 Indonesia dan AS secara resmi melakukan kerjasama pertahanan dalam bentuk hibah pesawat tempur F-16 dengan jumlah 24. Hibah pesawat F-16 disebut sebagai babak baru hubungan kedua negara di sektor pertahanan karena jumlah pesawat yang diberikan sangat banyak (Laksmana 2018). Menteri Pertahanan Indonesia pada saat itu, Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa ini bagian dari upaya kementerian pertahanan untuk meningkatkan kekuatan alutsista dan demi mencegah ancaman yang nantinya akan mengganggu keamanan Indonesia.

Namun, Ryamizard Ryacudu tidak menjelaskan secara jelas siapa yang akan menjadi ancaman bagi stabilitas Indonesia dan dalam bentuk apa ancaman tersebut. Hibah 24 pesawat F-16 bukanlah jumlah yang sedikit, ini mengindikasikan bahwa ada sebuah keadaan yang sangat mendesak, jika ditarik dari belakang pemerintah secara tegas meningkatkan fokusnya di sektor pertahanan melalui pembentukan Bakamla, peningkatan anggaran pertahanan sampai mengubah nama laut LCS menjadi Laut Natuna Utara. Dapat dilihat ini merupakan sebuah tanda bahwa Indonesia ingin menegaskan posisinya di LCS melalui peningkatan kekuatan serta kerjasama dengan AS.

Kemudian di tahun 2020 “US Department of Defense” merilis laporan tahunan yang cukup provokatif dengan judul Military and “Security Developments Involving the People’s Republic of China 2020”. Laporan ini dengan jelas menyebutkan bahwa pemerintah Tiongkok berencana untuk membangun pangkalan militer di beberapa negara demi menciptakan jalur logistik, infrastruktur dan yang utama demi memperluas jangkauan operasi “People’s Liberation Army” (PLA) atau

Tentara Nasional Tiongkok. Salah satu negara yang menjadi bagian dari rencana Tiongkok adalah Indonesia (US-China Institute 2021).

Namun, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia secara tegas menolak rencana ini, “Saya ingin tegaskan, sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan digunakan sebagai pangkalan fasilitas militer bagi negara manapun,” kata Retno dalam konferensi pers, Jumat. Saya ulangi, wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan digunakan sebagai pangkalan fasilitas militer bagi negara manapun” (Sutrisno 2020).

Disisi lain, AS berhasil menyakinkan Indonesia untuk bekerjasama membangun Pusat Pelatihan Maritim Bakamla di Pangkalan Armada Batam pada 25 Juni 2021. Menariknya adalah pembangunan Pusat Pelatihan Maritim Bakamla melibatkan banyak sekali pihak mulai dari “US Coast Guard”, Bakamla, Kedubes AS sampai Komando Indo-Pasifik, dengan menelan biaya sebesar US\$ 3,5 Juta. Duta Besar AS untuk Indo Sung Yo Kim mengatakan bahwa, “Sebagai sahabat dan mitra Indonesia, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung peran utama Indonesia dalam memajukan perdamaian dan keamanan regional dengan melawan kejahatan domestik dan transnasional”. Ini menjadi sebuah komitmen dan keseriusan AS dalam rangka menjaga stabilitas di Indo-Pasifik melalui kerjasama dengan pihak yang memiliki pengaruh cukup besar seperti Indonesia (Antara 2021). Pusat Pelatihan Maritim Bakamla juga menjadi sebuah indikasi bahwa AS selangkah di depan Tiongkok. Ini tentunya akan menempatkan militer AS pada posisi yang strategis di Indonesia dan kawasan.

Kemudian di tahun 2021 Anthony Blinken pada pertemuan dengan Retno Marsudi di Jakarta, menyatakan “Amerika Serikat dan Indonesia memiliki visi yang sama akan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan. Indonesia merupakan pemimpin dalam ASEAN dan “jangkar” tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Amerika Serikat senantiasa memiliki keterlibatan mendalam di Indo-Pasifik, dan kami serta mitra-mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk menghindari konflik adalah dengan menegaskan kembali nilai-nilai bersama kita. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk melindungi hak-hak maritimnya dan mempertahankan diri dalam menghadapi agresi Republik Rakyat China (RRC) di Laut China Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna”.

Namun, sikap ini nampaknya diterapkan kepada kedua belah pihak, di awal tahun 2021 pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon AS yang mencoba mendarat dan melakukan pengisian bahan bakar di Indonesia ditolak. Pemerintah Indonesia merespon ini dengan menyatakan bahwa ini merupakan komitmen Indonesia yang ingin menjaga netralitas di kawasan melalui “pelarangan militer asing melakukan operasi di wilayah Indonesia”. Kemudian, pada Mei 2021, TNI AL dan Militer Tiongkok secara resmi melakukan latihan militer bersama, sebelumnya Militer Tiongkok memberikan bantuan kepada TNI AL dalam rangka mengangkat bangkai kapal KRI Nanggala yang tenggelam di perairan Laut Bali.

Walaupun memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan negara-negara di ASEAN terkait isu keamanan di LCS, akan tetapi Tiongkok mampu meyakinkan negara di ASEAN untuk membeli senjatanya. Thailand membeli kapal selam dan

tank asal Tiongkok dengan nilai \$69 juta. Tiongkok kemudian memberikan \$7,3 juta ke Filipina dalam bentuk bantuan militer di tahun 2017. Dan kemudian melakukan latihan dengan militer Kamboja dan Laos (Yuliantoro 2021).

Fakta menariknya, Indonesia setiap tahunnya terus melakukan impor senjata bahkan jumlah dan mitranya terus meningkat. Di tahun 2016 Indonesia melakukan impor senjata sebesar 1,2 miliar dollar, akan tetapi Indonesia memasok dari 32 negara berbeda. Di sisi lain AS belum pernah menjadi pemasok utama senjata bagi Indonesia. Evan Laksmana menuturkan bahwa ini menunjukkan AS tidak dapat mempengaruhi secara signifikan kebijakan pertahanan Indonesia walaupun kedua negara memiliki hubungan pertahanan yang cukup erat melalui pembelian senjata, latihan bersama sampai bantuan keuangan (Laksmana 2018).

Komitmen AS dalam rangka menjaga stabilitas di kawasan nampaknya akan semakin menguat di tahun-tahun berikutnya. AS sadar bahwa Indonesia memiliki posisi yang penting di kawasan, maka dari itu membangun hubungan yang erat Indonesia merupakan suatu keharusan. Seperti yang dijelaskan di atas AS tidak dapat menentukan arah kebijakan pertahanan Indonesia walaupun di satu sisi terus membangun kerjasama pertahanan. Indonesia sadar bahwa berpihak secara langsung dengan AS akan membawa dampak yang sangat signifikan bagi stabilitas di kawasan dan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok.

Melalui variabel nilai dan simetrikal Indonesia berhasil membangun hubungan yang positif antara Tiongkok dan AS. Indonesia mampu menempatkan posisi dengan baik melalui kerjasama ekonomi dan militer. Ini didasarkan pada hubungan yang negatif di antara Tiongkok dan AS melalui perang dagang dan

respon di LCS. Pada akhirnya kerjasama militer yang melibatkan Indonesia dan AS merupakan sebuah hasil dan proses dinamika diantara ketiga aktor.

3.4 Posisi Akhir dari Ketiga Aktor

Ketiga aktor berhasil mengakui keberadaan serta strategi satu sama lain melalui hubungan bilateral, kerjasama ekonomi dan militer, doktrin serta pernyataan secara langsung. Hubungan yang telah dibangun oleh ketiga aktor merupakan proses dari penerapan variabel nilai yang terdiri dari hubungan positif dan negatif serta variabel simetris yakni kebuntuan militer. Doktrin dari ketiga aktor merupakan fondasi bagi hubungan yang dijalin kedepannya. AS melalui Pivot to Asia berusaha membangun ulang tatanan di Asia, akan tetapi Tiongkok melihat ini sebagai sebuah ancaman nyata maka dari itu Tiongkok merespon tindakan AS melalui “China Dream” yang diwujudkan melalui kerjasama ekonomi dan agresivitas militer. Indonesia berada pada posisi yang cukup strategis bagi kedua negara maka dari itu Indonesia berusaha membangun hubungan positif dengan kedua negara melalui kerjasama ekonomi dan militer.

Hubungan yang negatif antara Tiongkok dan AS merupakan sebuah peluang dan tantangan. Instabilitas antara kedua negara dapat dimanfaatkan dengan baik melalui hubungan positif antara Indonesia terhadap Tiongkok dan AS. Ini dibuktikan melalui kerjasama ekonomi dan militer. Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tiongkok menjadi mitra utama perdagangan bagi Indonesia, kreditur terbesar keempat, serta investor nomor tiga setelah Singapura dan Jepang. Indonesia dan Tiongkok menjalin kerjasama 72 proyek

infrastruktur senilai 17,29 miliar dollar dalam kurun waktu 2015-2021. Namun, kondisi ini berbanding terbalik antara Indonesia dan AS. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan AS di era Jokowi terjadi stagnasi. Ini didasarkan pada fokus kebijakan luar negeri Jokowi yang ingin meningkatkan investasi secara besar-besaran dalam rangka mendukung visi GMF.

Kedekatan Indonesia dan Tiongkok di sektor ekonomi tidak membuat Indonesia melupakan mitra lamanya yakni AS. Indonesia dan AS memiliki masalah yang serupa di agresivitas Tiongkok di LCS, Indonesia bukan bagian dari pihak yang memiliki klaim di LCS. Namun, Indonesia berusaha melindungi ZEE dan stabilitas di kawasan. Sedangkan bagi AS agresivitas Tiongkok merupakan ancaman bagi “Rules Based Order” yang telah bertahan selama puluhan tahun. Maka dari itu sejak tahun 2016 Indonesia telah melakukan komunikasi dengan AS terkait dengan ancaman Tiongkok. Komunikasi ini pun berlanjut menjadi sampai ke tahap hibah pesawat sampai komitmen dari kedua negara di tahun 2021 untuk mempertahankan stabilitas di kawasan.

BAB IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Ketiga negara saling mengakui kehadiran masing-masing, doktrin dari ketiga aktor menjadi sebuah pemantik bagi aktor lainnya untuk merespon dan mengambil sikap. Pertama AS menganggap bahwa Tiongkok merupakan sebuah ancaman nyata bagi AS dan dunia, oleh karena itu AS mengeluarkan sikap tegas dalam bentuk doktrin “Pivot to Asia” dan “Free and Open Indo-Pacific”. Namun, nyatanya keadaan semakin memburuk dibuktikan dengan respon oleh pihak Tiongkok melalui “China Dream” yang di dalamnya secara tegas untuk membawa Tiongkok selangkah di depan. Pada akhirnya situasi ini mengharuskan Indonesia untuk memposisikan diri dengan baik agar kepentingan nasionalnya tetap tercapai. Indonesia memiliki posisi penting dan diakui oleh AS dan Tiongkok, ini didasarkan pada letak geografis dan potensinya.

Indonesia menjalin hubungan yang positif dengan AS dan Tiongkok atas dasar hubungan negatif antara AS dan Tiongkok. Indonesia memanfaatkan ini dengan menjalin kerjasama ekonomi yang masif dengan Tiongkok dan kerjasama pertahanan yang aktif dengan AS. Sikap positif yang Indonesia bangun di antara AS dan Tiongkok dibuktikan pada bergabungnya Indonesia dalam proyek BRI sejak tahun 2014 dan mendorong hubungan bilateral dan ekonomi kedua negara ke tahap yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tiongkok menjadi mitra utama perdagangan, investor ketiga terbesar dan menjadi salah satu kreditur bagi

Indonesia. Di sisi lain, ancaman di LCS dan Laut Natuna Utara dimanfaatkan Indonesia untuk menjalin kerjasama pertahanan dengan AS. Indonesia secara berkala terus membuka komunikasi, mendapatkan bantuan hibah, pendanaan dan mendukung inisiasi Asia-Pasifik yang terbuka dan aman.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam bab 1 sampai bab 3, penulis merekomendasikan agar penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dinamika hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan AS membahas terkait dengan:

1. Penulis memberikan rekomendasi agar penelitian selanjutnya berfokus pada perubahan teori. Maka dari itu judul yang dapat digunakan yakni “Dinamika Hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan AS dalam perspektif *Decision Making Process* tahun 2014-2021” serta “Dinamika Hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan AS dalam perspektif *Defence Realism* tahun 2014-2021”. Teori ini menjadi begitu penting dan menarik agar terciptanya sudut pandang baru dalam melihat dinamika yang terjadi diantara ketiga negara.
2. Peran negara-negara ASEAN lainnya menjadi begitu penting ditengah-tengah perseteruan antara Tiongkok dan AS. Maka dari itu penulis merekomendasikan judul “Dinamika Hubungan ASEAN dengan Tiongkok dan AS dalam perspektif Segitiga Strategis.
3. Pada sebelumnya objek penelitian adalah Tiongkok dan AS, maka dari itu penulis merekomendasi judul sebaliknya yakni bagaimana Tiongkok dan AS ditempatkan sebagai subjek penelitian. Judul penelitian tersebut dapat

berupa “Dinamika Hubungan Tiongkok serta AS dengan Indonesia dalam perspektif segitiga strategis”. Ini akan merubah fokus dan melahirkan perspektif baru dalam kajian hubungan internasional.



DAFTAR PUSTAKA

- “Advancing the US–Indonesia Defence Relationship.” 2021. East Asia Forum. January 19, 2021. <https://www.eastasiaforum.org/2021/01/19/advancing-the-us-indonesia-defence-relationship/>.
- After Engagement: Dilemmas in U.S.-China Security Relations*. 2021. Brookings Institution Press. <https://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctv11hpt2r>.
- Ali, Ismail, and Singgih Tri Sulistiyono. 2020. “A Reflection of ‘Indonesian Maritime Fulcrum’ Initiative: Maritime History and Geopolitical Changes.” *Journal of Maritime Studies and National Integration* 4 (1): 12–23. <https://doi.org/10.14710/jmsni.v4i1.8081>.
- “‘America Is an Important Country’, Prabowo to Visit US for First Time in Decades - National - The Jakarta Post.” n.d. Accessed February 22, 2022. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/13/america-is-an-important-country-prabowo-to-visit-us-for-first-time-in-decades.html>.
- “America’s Pacific Century – Foreign Policy.” n.d. Accessed March 25, 2022. <https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/>.
- “Are Military Assistance Programs Important for US–Indonesia Ties? | East Asia Forum.” n.d. Accessed March 25, 2022. <https://www.eastasiaforum.org/2018/04/18/are-military-assistance-programs-important-for-us-indonesia-ties/>.
- “Belt and Road Initiative.” n.d. *Belt and Road Initiative* (blog). Accessed March 25, 2022. <https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/>.
- Byrne, Caitlin. 2020. “Securing the ‘Rules-Based Order’ in the Indo-Pacific: The Significance of Strategic Narrative.” *Security Challenges* 16 (3): 10–15.

“China Claims Progress in Helping Recover Sunken Indonesian Submarine after Tragedy | South China Morning Post.” n.d. Accessed February 22, 2022.

<https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3134039/china-claims-progress-helping-recover-sunken-indonesian>.

“China’s Attempt to Bully Australia Has Been a Spectacular Failure.” n.d.

Accessed March 25, 2022. <https://foreignpolicy.com/2021/11/09/australia-china-decoupling-trade-sanctions-coronavirus-geopolitics/>.

Codingest. n.d. “Beranda - Portal Satudata Perdagangan.” Satu Data Kemendag.

Accessed March 26, 2022. [//satudata.kemendag.go.id/](https://satudata.kemendag.go.id/).

Colin, Sébastien. 2016. “China, the US, and the Law of the Sea.” *China Perspectives* 2016 (2): 57–62.

CSIS. n.d. “Perceptions and Readiness of Indonesia towards the Belt and Road

Initiative | CSIS.” <https://www.csis.or.id/>. Accessed March 26, 2022.

<https://www.csis.or.id/publications/perceptions-and-readiness-of-indonesia-towards-the-belt-and-road-initiative/>.

Dittmer, Lowell. 1981. “The Strategic Triangle: An Elementary Game-Theoretical Analysis.” *World Politics* 33 (4): 485–515.

<https://doi.org/10.2307/2010133>.

Division, US Census Bureau Foreign Trade. n.d. “Foreign Trade: Data.” Accessed

March 26, 2022. <https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5600.html>.

“Does ASEAN Matter? A View from Within | ISEAS Publishing.” n.d. Accessed

March 26, 2022. <https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2332>.

Dwi, Aisyah. 2020. "THE ROLE ANALYSIS OF INDONESIA'S POLICY STRATEGY ON INDO-PACIFIC." *Journal of Diplomacy and International Studies* 3 (01): 39–50.

"Dynamic Equilibrium: Indonesia's Blueprint for a 21st Century Asia Pacific." n.d. Accessed March 26, 2022. <https://www.csis.org/analysis/dynamic-equilibrium-indonesia%E2%80%99s-blueprint-21st-century-asia-pacific>.

"FACT SHEET: Indo-Pacific Strategy of the United States." 2022. The White House. February 11, 2022. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/11/fact-sheet-indo-pacific-strategy-of-the-united-states/>.

Gingrich, Newt. 2020. *Trump Vs. China: Facing America's Greatest Threat*. Center Street.

Grossman, Derek. 2021. "Indonesia Is Quietly Warming Up to China." June 7, 2021. <https://www.rand.org/blog/2021/06/indonesia-is-quietly-warming-up-to-china.html>.

"How the U.S. Should Respond to China's Belt and Road." n.d. Council on Foreign Relations. Accessed March 25, 2022. <https://www.cfr.org/report/chinas-belt-and-road-implications-for-the-united-states/>.

"IN BRIEF: Fifteen Takeaways from Our New Report Measuring US and Chinese Global Influence - Atlantic Council." n.d. Accessed February 22, 2022. <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/in-brief-15-takeaways-from-our-new-report-measuring-us-and-chinese-global-influence/>.

- “In the Dragon’s Shadow | Yale University Press.” n.d. Accessed February 22, 2022. <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300234039/dragons-shadow>.
- Inayati, Ratna Shofi. 2016. “Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia.” *Jurnal Penelitian Politik* 2 (1): 35–49. <https://doi.org/10.14203/jpp.v2i1.390>.
- “Indonesia as ‘Global Maritime Fulcrum’: A Post-Mortem Analysis.” 2019. Asia Maritime Transparency Initiative. November 8, 2019. <https://amti.csis.org/indonesia-as-global-maritime-fulcrum-a-post-mortem-analysis/>.
- “Indonesia, AS Mulai Pembangunan Pusat Pelatihan Maritim - ANTARA News.” n.d. Accessed March 25, 2022. <https://www.antaranews.com/berita/2231710/indonesia-as-mulai-pembangunan-pusat-pelatihan-maritim>.
- “Indonesia: Balancing the United States and China, Aiming for Independence.” n.d. Koninklijke Brill NV. Accessed February 22, 2022. https://doi.org/10.1163/2468-1733_shifr_SIM210040027.
- “Indonesia Punya Utang Tersembunyi Ke China? Ini Kata Stafsus Sri Mulyani Halaman All - Kompas.Com.” n.d. Accessed March 25, 2022. <https://money.kompas.com/read/2021/10/15/183400226/indonesia-punya-utang-tersembunyi-ke-china-ini-kata-stafsus-sri-mulyani?page=all>.
- “‘Indonesia Won’t Be Military Base for Any Country’, Retno Says, Dismissing Pentagon Report - World - The Jakarta Post.” n.d. Accessed March 25, 2022. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/04/indonesia-wont->

be-military-base-for-any-country-retno-says-dismissing-pentagon-report.html.

Institute, Lowy. n.d. "Map - Lowy Institute Asia Power Index." Lowy Institute Asia Power Index 2021. Accessed March 25, 2022.

<https://power.lowyinstitute.org/countries/united-states/>,
<https://power.lowyinstitute.org/>.

Jinbo, Wang. 2019. *The China–Indochina Peninsula Economic Corridor*.

Routledge Handbooks Online. <https://doi.org/10.4324/9780429203039-39>.

"Jokowi: Stabilitas Di Laut China Selatan Tercipta Jika Semua Negara Hormati UNCLOS 1982." n.d. Accessed March 26, 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/05/15100921/jokowi-stabilitas-di-laut-china-selatan-tercipta-jika-semua-negara-hormati>.

"Jokowi's Global Maritime Fulcrum: 5 More Years?" n.d. Accessed February 22, 2022. <https://thediplomat.com/2019/06/jokowis-global-maritime-fulcrum-5-more-years/>.

"Kapal China Kembali Masuk Laut Natuna, Menolak Pergi Meski Sudah Diusir Bakamla Halaman All - Kompas.Com." n.d. Accessed March 26, 2022.

<https://regional.kompas.com/read/2020/09/13/05250081/kapal-china-kembali-masuk-laut-natuna-menolak-pergi-meski-sudah-diusir?page=all>.

Kaplan, Sam. 2021. *Challenging China: Smart Strategies for Dealing with China in the Xi Jinping Era*. Tuttle Publishing.

"Kemenperin: 7 Tahun Pemerintahan Jokowi, Investasi Dan Ekspor Industri Kian Bergeliat." n.d. Accessed March 25, 2022.

[https://kemenperin.go.id/artikel/22895/7-Tahun-Pemerintahan-Jokowi,-
Investasi-dan-Ekspor-Industri-Kian-Bergeliat](https://kemenperin.go.id/artikel/22895/7-Tahun-Pemerintahan-Jokowi,-Investasi-dan-Ekspor-Industri-Kian-Bergeliat).

“Kenaikan Anggaran Pertahanan Untuk Modernisasi Dan Pemeliharaan Alutsista: Solusi Atau Ilusi? | CSIS.” n.d. Accessed February 22, 2022.

[https://www.csis.or.id/publications/kenaikan-anggaran-pertahanan-untuk-
modernisasi-dan-pemeliharaan-alutsista-solusi-atau-ilusi](https://www.csis.or.id/publications/kenaikan-anggaran-pertahanan-untuk-modernisasi-dan-pemeliharaan-alutsista-solusi-atau-ilusi).

Khanna, Parag. 2019. *The Future Is Asian*. Simon & Schuster.

Lee, Katy. 2015. “China Is on a Crazy Mission to Build Artificial Islands. What the Hell Is It up To?” Vox. March 13, 2015.

<https://www.vox.com/2015/3/13/8203713/south-china-sea-explained>.

M.A, Dr Amir Hamzah. 2021. *METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN (Research & Development) Uji Produk Kuantitatif dan Kualitatif Proses dan Hasil Dilengkapi Contoh Proposal Pengembangan Desain Uji Kualitatif dan Kuantitatif*. CV Literasi Nusantara Abadi.

“Man of Contradictions: A Lowy Institute Paper: Penguin Special by Ben Bland.” n.d. Accessed February 22, 2022.

[https://www.penguin.com.au/books/man-of-contradictions-a-lowy-
institute-paper-penguin-special-9781760897246](https://www.penguin.com.au/books/man-of-contradictions-a-lowy-institute-paper-penguin-special-9781760897246).

Media, Kompas Cyber. 2021. “Mengupas Kerja Sama Investasi China di Indonesia.” KOMPAS.com. January 13, 2021.

[https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-
sama-investasi-china-di-indonesia](https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-china-di-indonesia).

Mediatama, Grahanusa. 2021. “Menlu Retno kepada Menlu China: Jaga Laut China Selatan dengan hormati UNCLOS 1982.” kontan.co.id. January 15,

2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/menlu-retno-kepada-menlu-china-jaga-laut-china-selatan-dengan-hormati-unclos-1982>.

“Mendayung Antara Dua Karang | Moh Hatta | Download.” n.d. Accessed February 22, 2022. <https://en.id1lib.org/book/6129911/cb4570>.

“Menuju Kekuatan Utama Dunia: Sekilas Politik Luar Negeri Cina Edisi Kedua | UGM PRESS - Badan Penerbit Dan Publikasi Universitas Gadjah Mada.” n.d. Accessed March 25, 2022.

<https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/menuju-kekuatan-utama-dunia-sekilas-politik-luar-negeri-cina-edisi-kedua>.

Pattiradjawane, René L. 2016. “The Indonesian Perspective toward Rising China: Balancing the National Interest.” *Asian Journal of Comparative Politics* 1 (3): 260–82. <https://doi.org/10.1177/2057891116646226>.

Patunru, Arianto A., Mari Pangestu, and M. Chatib Basri. 2018. *Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

“Pertemuan Menlu AS Antony J. Blinken dengan Menlu Indonesia Retno Marsudi.” 2021. Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. August 4, 2021. <https://id.usembassy.gov/id/pertemuan-menlu-as-antony-j-blinken-dengan-menlu-indonesia-retno-marsudi/>.

Pratiwi, Fadhila Inas, Irfa Puspitasari, Indah Hikmawati, and Harvian Bagus. 2021. “Global Maritime Fulcrum: Indonesia’s Middle Power Strategy Between Belt And Road Initiatives (BRI) and Free-Open Indo Pacific (FOIP).” *Central European Journal of International and Security Studies* 15 (3): 30–54. <https://doi.org/10.51870/CEJISS.A150302>.

- Pratiwi, Fadhila Inas, Novita Putri Rudian, IGB Dharma Agastia, Rifki Dermawan, Masitoh Nur Rohma, Frisca Alexandra, Ariski Aznor, and SD Hardi Alunaza. 2020. "China Belt and Road Initiatives (BRI) in Indonesia's Socio-Economic Security Challenges: A Policy Recommendation." *Sorotan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Mata Akademisi Muda Indonesia*. Centre for Strategic and International Studies. <https://www.jstor.org/stable/resrep25407.9>.
- Reuters*. 2020. "Indonesia to U.S., China: Don't Trap Us in Your Rivalry," September 8, 2020, sec. APAC. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-foreign-minister-idUSKBN25Z1ZD>.
- Reuters*, and Stanley Widiyanto. 2021. "China to Import More Indonesian Products to Balanced Trade." *Reuters*, January 13, 2021, sec. China. <https://www.reuters.com/world/china/indonesia-calls-more-trade-barriers-with-china-be-removed-2021-01-13/>.
- Routledge Handbook of the South China Sea*. 2021. Routledge Handbooks Online. <https://doi.org/10.4324/9780367822217>.
- Scobell, Andrew, Edmund J. Burke, Cortez A. III Cooper, Sale Lilly, Chad J. R. Ohlandt, Eric Warner, and J. D. Williams. 2020. "China's Grand Strategy: Trends, Trajectories, and Long-Term Competition." RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2798.html.
- "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | President Jokowi Calls for Mutually Respectful Partnership at 24th ASEAN-China Summit." n.d. Accessed March 25, 2022. <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-calls-for-mutually-respectful-partnership-at-24th-asean-china-summit/>.

- “South China Sea Energy Exploration and Development.” n.d. Asia Maritime Transparency Initiative. Accessed March 25, 2022.
<https://amti.csis.org/south-china-sea-energy-exploration-and-development/>.
- Strangio, Sebastian. 2020. *In the Dragon’s Shadow: Southeast Asia in the Chinese Century*. Yale University Press.
- Sulaiman, Yohanes, Mariane Delanova, and Rama Daru Jati. 2021. “Indonesia between the United States and China in a Post-Covid-19 World Order.” *Asia Policy* 28 (1): 155–78. <https://doi.org/10.1353/asp.2021.0007>.
- “Talking Indonesia: Chinese Indonesians and China’s Rise.” n.d. Indonesia at Melbourne. Accessed March 26, 2022.
<https://indonesiatmelbourne.unimelb.edu.au/talking-indonesia-chinese-indonesians-and-chinas-rise/>.
- “Timeline: U.S. Relations With China 1949–2022.” n.d. Council on Foreign Relations. Accessed March 25, 2022. <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china>.
- “Trump Tuduh Indonesia ‘Curang’ - Infografik Katadata.Co.Id.” n.d. Accessed March 26, 2022.
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a5678736fd/trump-tuduh-indonesia-curang>.
- “U.S. Dept. of Defense, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2021, November 2, 2021 | US-China Institute.” n.d. Accessed March 25, 2022. <https://china.usc.edu/us-dept->

defense-military-and-security-developments-involving-peoples-republic-china-2021-november-2.

Vanhullebusch, Matthias, and Wei Shen. 2016. "China's Air Defence Identification Zone: Building Security through Lawfare." *China Review* 16 (1): 121–50.

"What Does China Really Spend on Its Military?" 2015. *ChinaPower Project* (blog). December 28, 2015. <https://chinapower.csis.org/military-spending/>.

"Why ASEAN's Indo-Pacific Outlook Matters." 2019. East Asia Forum. August 11, 2019. <https://www.eastasiaforum.org/2019/08/11/why-aseans-indo-pacific-outlook-matters/>.

